

WARTA **PENGAWASAN**

NOMOR 3 TAHUN 2019

KAWAL AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

“MEMBANGUN KOMUNITAS APIP KELAS DUNIA”



ISSN 0854-0519



Majalah **Warta Pengawasan** merupakan media informasi dan komunikasi di lingkungan aparat pengawasan serta sebagai sarana untuk memasyarakatkan konsep dan praktik pengawasan kepada seluruh lapisan masyarakat

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP Pusat Lantai 1 Jalan Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62 21 85910031, pes 0102 dan 0103, Diterbitkan Oleh: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan: Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013 Tanggal 26 Maret 2013 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519, *Homepage*: www.bpkp.go.id - *Email*: warta_pengawasan@bpkp.go.id. Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

Majalah **Warta Pengawasan** dapat di unduh melalui



EDITOR'S NOTE

"If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together."

-African Proverb

Pada tahun 2009, Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan bahwa manusia Indonesia cenderung bersifat komunal ketimbang individual. Dalam KBBI, Komunal sendiri berarti bersangkutan. Sentimen berupa kesadaran untuk bertindak secara bersama-sama tersebut bisa didasari oleh berbagai hal, seperti persamaan latar budaya, agama, hingga profesi. Sebagai *zoon politicon* atau makhluk sosial, maka selalu ada kebutuhan untuk berkumpul, berbagi informasi, berjejaring, dan menjadi bagian dari sebuah kelompok. Katanya, "Urun rembuk adalah kunci!". Jika ditelusuri, sifat komunal ini sesungguhnya banyak tercermin dalam adat budaya di Indonesia. Salah satunya pada Rumah Adat Sasadu di Halmahera Barat. Rumah adat suku Sahu tersebut

dirancang tanpa pintu yang menyimbolkan siapapun boleh masuk dan diterima secara terbuka. Sasadu biasanya difungsikan sebagai tempat berkumpul untuk bermusyawarah maupun upacara adat.

Seiring perkembangan era, wadah bagi manusia untuk saling berkumpul dan tetap terhubung mengalami revolusi. Komunikasi kelompok yang biasanya hanya bisa dilakukan secara tatap muka, kini bisa melalui layar, melintasi zona waktu dan tempat. Keunggulan kompetitif semacam itu dirayakan dengan tumbuh subur nya komunitas mulai dari komunitas hobi hingga komunitas praktisi, tak terkecuali pada profesi audit internal. Di Majalah **Warta Pengawasan** edisi 3 tahun 2019 kali ini, redaksi menyuguhkan artikel yang akan membantu Pembaca untuk lebih mengenal

komunitas praktisi. Apakah komunitas praktisi atau yang sering dikenal dengan *Community of Practice (CoP)* sama dengan komunitas lainnya? Lebih jauh lagi, bagaimana kontribusi BPKP sebagai bagian dari semesta audit internal dalam *knowledge and best practice sharing* di lingkup nasional dan internasional?

Selain mengajak Pembaca untuk menelusuri tentang CoP, redaksi juga telah menyiapkan informasi-informasi lain yang tak kalah inspiratif melalui beragam sajian rubrik, seperti ulasan buku dan film, wisata, hingga sertifikasi profesi. Bagi Pembaca penikmat musik, tentu Anda tidak ingin melewatkan rubrik *The Beauty of Indonesia* yang memberikan tips nyaman nge-gigs di akhir pekan. Jadi, tunggu apa lagi? Selamat membaca **Warta Pengawasan** edisi kali ini.

Salam Redaksi

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung: Kepala BPKP - **Pembina:** Sekretaris Utama - **Penasihat:** Para Deputi Kepala BPKP - **Penganggung Jawab:** Syaifudin Tagamal - **Kontributor Ahli:** Maliki Heru Santosa, Djoko Prihardono, Amdi Very Dharma, Edi Mulia - **Kontributor Tetap:** Nani Ulina, Fauzi, Setya Nugraha - **Pemimpin Umum:** Catur Imam Pratigny - **Wakil Pemimpin Umum:** M. Muslihuddin - **Pemimpin Redaksi:** Betrika Oktaresa - **Pemimpin Administrasi:** Ratna Wijihastuti - **Redaktur Pelaksana:** Dian Setyawati - **Sekretaris Redaksi:** Hilwiya Agustine - **Reporter:** Suryo Cahyo Putro, Gilang Rahmat Hastanto, Ayu Isni Arum, Nadia Khaerunnisa, Amalia Septianti, Adithia Ramadhan, Devina - **Keuangan:** Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini - **Desain Grafis:** Idiya Zikra, Ichi Daroma Agustin, Viana Anggraeni Zahrin - **Administrasi:** Budi Sutjahyo, Nursanty Sinaga, R. Hanifah - **Dokumentasi:** Edi Purwanto, Adi Sasongko - **Sirkulasi:** R. Hanifah

CONTENTS

- 04 THE BRIEF**
Pengawal Pembangunan Nasional yang Berkelas Dunia
- 08 COVER STORY**
08 Cara Perkuat Kompetensi Masa Kini
12 *Community of Practice* Auditor Internal Sektor Publik
- 16 PHOTO STORY**
- 18 INSIGHT**
Regional Internal Audit Workshop di Atas Awan
- 22 INDONESIA THIS QUARTER**
- 26 INFOGRAPHIC**
Berkomunikasi dalam Tim
- 28 CONTROL VANTAGE POINT**
Budaya dan Konteks Lokal dalam Sistem Pengendalian
- 31 RISK MANAGEMENT VANTAGE POINT**
Pemda Berpeduli Risiko: Antara Harapan dan Tantangan
- 34 INTERNAL AUDITOR'S UPDATE**
Mahadaya Mahadata
- 38 SPIP TALK**



- 40 ORGANIZATIONAL CULTURE**
Community of Practice: Jangan Biarkan Pengetahuan Hilang Ditelan Bumi
- 44 CERTIFICATION**
Jadi Auditor Forensik Ciamik!
- 46 JFA TALK**
- 49 TRIVIA**
- 50 BOOK REVIEW**
Skeptis Pangkal Selamat
- 52 MOVIE REVIEW**
Kabar Baiknya Adalah Selalu Ada Kabar Buruk
- 54 THE BEAUTY OF INDONESIA**
Konser Musik, Alternatif Liburan Akhir Pekan



PENGAWAL PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELAS DUNIA

Pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang komprehensif. Tidak hanya berkomitmen untuk mencapai hasil penyelenggaraan program yang berkualitas, pemerintah juga berkomitmen tinggi untuk memastikan terjaganya akuntabilitas. Dengan memperhatikan aspek pencapaian hasil dan aspek akuntabilitas secara bersamaan, belanja pemerintah diharapkan dapat bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk dapat mewujudkan akuntabilitas program pembangunan itu, diperlukan penguatan dua pilar pengawalan akuntabilitas yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tantangan penguatan dua pilar akuntabilitas tersebut direspon oleh BPKP bersama dengan APIP lainnya. Hal ini relevan dengan Visi BPKP yaitu “Auditor Internal Pemerintah Republik Indonesia Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”

Foto
Adithia



Tim BPKP sedang melakukan penugasan reuiu tata kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Logung di Kudus

Foto
Adin Sukardi

Selama periode 2014-2019 dilakukan upaya terukur melalui peningkatan level Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP. BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP berupaya agar kualitas SPIP di berbagai tingkatan pemerintahan dapat meningkat. Selain melalui SPIP, pengawalan akuntabilitas program pembangunan nasional ditopang oleh APIP yang kapabel, sesuai dengan amanah Presiden RI Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015. Merespon amanah Presiden tersebut, BPKP melaksanakan pembinaan kapabilitas APIP sehingga kemampuan APIP dalam menjalankan peran pengawasannya semakin meningkat. Kemudian, BPKP menyadari bahwa dalam upaya menjaga akuntabilitas pembangunan nasional, tidak dapat dilakukan sendiri melainkan harus bersinergi dan berkolaborasi dengan APIP lainnya. Selain itu, sebagai bentuk komitmen sinergi pengawasan dalam pembangunan nasional yang lebih luas lagi, BPKP bersama dengan Asosiasi dan Lembaga Auditor Intern

dari berbagai sektor bersepakat untuk membentuk Aliansi Auditor Intern Indonesia (AAII).

Upaya-upaya yang dilakukan dan dampak perubahan terkait penguatan dua pilar akuntabilitas di atas, menggambarkan kemajuan tata kelola dan praktik pengawasan intern pemerintah Indonesia. Hal tersebut ternyata tidak luput dari perhatian dunia. BPKP beberapa kali diundang dalam berbagai forum dunia. Selain itu, inovasi pengawasan intern di Indonesia mendorong negara-negara lain untuk melakukan *benchmarking* ke BPKP dan APIP lainnya. Dalam Warta Pengawasan kali ini, kami akan menyertakan tentang bagaimana BPKP berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pengawasan internal pemerintah. Selain membagi, dalam kesempatan yang sama, BPKP juga secara simultan menggali pengetahuan dan pengalaman dari negara-negara tersebut. Dengan terbangunnya jaringan antar negara-negara ini, yang memiliki ketertarikan dan bidang kompetensi yang sama, maka sangat mungkin terbentuk sebuah wadah komunitas yang bermanfaat bagi negara-negara tersebut dalam menjalankan praktiknya, pengawasan intern pemerintah. Berdasarkan penggambaran ini, tentu visi menjadi auditor internal Pemerintah Republik Indonesia yang berkelas dunia merupakan sebuah keniscayaan, bukan?



“A developed country is not a place where the poor have cars. It’s where the rich use public transportation”

Mayor of Bogota

Foto
Ichi Daroma



Cara Perkuat Kompetensi Masa Kini

Betrika Oktaresa

COP, apa yang ada dibayangkan pembaca ketika mendengar atau membaca kata COP? Pasti tidak sedikit dari pembaca yang kemudian membayangkan sosok polisi. Tidak salah memang, karena istilah polisi dalam bahasa Inggris selain *police* adalah *Cop*. Sebagai informasi, sebutan *Cop* pada awalnya digunakan di Britania Raya dengan istilah *Copper* yang artinya seseorang yang bertugas menangkap (*capture*),

Ilustrasi
Ziddo S

kemudian mengalami peningkatan menjadi *Cop* sejak 1704. Lucunya, banyak mitos yang mengiringi panggilan tersebut, misalnya *Copper* digunakan untuk menyebut polisi karena merujuk pada kancing baju yang digunakan para polisi terbuat dari *copper* (tembaga). Bahkan ada mitos lain yang menyebutkan bahwa *Cop* merupakan singkatan dari “*Constable On Patrol*”. Nah, dalam Majalah Warta Pengawasan kali ini, kita akan membahas tentang CoP yang lain, yaitu merupakan singkatan dari *Community of Practice*.

Community of Practice (CoP) merupakan sebuah istilah yang menggambarkan tentang sekelompok individu atau organisasi yang memiliki kesamaan bidang keterampilan atau profesi. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh seorang *cognitive anthropologist* Jean Lave dan seorang *educational theorist* Etienne Wenger dalam buku mereka yang berjudul *Situated Learning*, diterbitkan pada tahun 1991. Tujuh tahun setelah buku itu diterbitkan, Wenger kemudian mengembangkannya ke dalam sebuah buku dengan judul “*Communities of Practice*”. Pada prinsipnya, CoP dapat berkembang secara alami karena kepentingan bersama anggota CoP, dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan terkait

“People working together in a strong community with a shared goal and a common purpose can make the impossible possible.”

– Tom Vilsack

bidang tertentu. Hal ini dapat diperoleh melalui proses berbagi informasi dan pengalaman, anggota belajar satu sama lain, dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara pribadi dan profesional. Sejak dipromosikan di awal tahun 90-an tersebut, CoP semakin menjadi perhatian,

dari awalnya sebagai teori dalam pembelajaran hingga bergeser menjadi pengelolaan pengetahuan.

Wenger menjelaskan bahwa struktur dari CoP terdiri dari tiga hal yang terkait. Pertama, *mutual engagement* atau dapat diartikan sebagai keterlibatan bersama, yaitu melalui partisipasi dalam komunitas, anggota membentuk norma dan membangun hubungan kolaboratif. Kedua, *joint enterprise* atau bisa diartikan penggabungan bersama antar pihak, di mana melalui interaksi para anggota, akan menciptakan pemahaman bersama tentang apa yang mengikat mereka bersama, secara singkat disebut sebagai domain komunitas. Ketiga, *shared repertoire*, yang jika diartikan maknanya adalah adanya sumber daya pengetahuan yang dihasilkan bersama dan digunakan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam pengembangan terkininya, Wenger menggarisbawahi bahwa

“There is no power for change greater than a community discovering what it cares about.”

– Margaret J. Wheatley

belajar adalah pusat identitas manusia. Individu sebagai peserta aktif dalam CoP, dan dalam pembangunan identitasnya melalui komunitas tersebut. Dalam konteks ini, CoP adalah sekelompok individu yang berpartisipasi dalam aktivitas komunal, dan secara terus-menerus menciptakan identitas bersama mereka melalui keterlibatan dan kontribusi terhadap praktik-praktik komunitas mereka. Karakteristik struktural dari komunitas praktik sekali lagi didefinisikan

ulang menjadi domain pengetahuan, gagasan komunitas dan praktik. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa domain pengetahuan menciptakan landasan bersama, mendorong anggota untuk berpartisipasi, membimbing pembelajaran para anggota dan memberi makna pada aktivitasnya. Lalu, gagasan tentang suatu komunitas menciptakan tatanan sosial untuk pembelajaran itu. Komunitas yang kuat memupuk interaksi dan mendorong keinginan untuk berbagi

ide. Sedangkan praktiknya adalah fokus spesifik di area yang telah ditetapkan oleh komunitas untuk mengembangkan, berbagi, dan mempertahankan inti pengetahuannya.

Terakhir, untuk memahami CoP, pembaca perlu membedakannya dengan kelompok atau komunitas lain yang biasanya ada di organisasi, salah satunya adalah *Community of Interest* (CoI). Perbedaan keduanya sebagai berikut:



Foto
Gadis Fithri

Perbedaan	<i>Community of Interest</i>	<i>Community of Practice</i>
Anggota 	Sekelompok orang yang tertarik untuk berbagi informasi dan berdiskusi atas topik tertentu, dimana tidak harus <i>expert</i> dalam topik terkait tersebut	Sekelompok orang atau organisasi yang merupakan praktisi atas bidang tertentu, dan aktif untuk berkolaborasi bersama dalam komunitas tersebut
Tujuan 	Menyediakan tempat bagi orang-orang yang memiliki minat yang sama untuk dapat bertukar informasi, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan pendapat mereka tentang topik tersebut	Memberikan cara bagi praktisi untuk berbagi kiat dan praktik terbaik, mengajukan pertanyaan kepada anggota yang lain, dan memberikan dukungan satu sama lain
Keahlian 	Tidak memiliki persyaratan keahlian, yang terpenting adalah ketertarikan pada subjek tertentu	Keanggotaan tergantung pada keahlian - harus memiliki setidaknya beberapa pengalaman dalam peran atau bidang subjek dalam CoP

Nah, setelah pembaca memahami apa itu CoP, dalam artikel berikutnya, kita akan membahas tentang upaya-upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh BPKP dalam upayanya

membangun CoP di bidang internal auditor, baik di lingkup nasional, regional, maupun internasional. Selamat membaca.

Foto
Gilang

Community of Practice Auditor Internal Sektor Publik

Betrika Oktaresa & Nadia Khaerunnisa

“Alone, we can do so little; together, we can do so much” – Helen Keller.

Prolog

Setelah dalam artikel sebelumnya pembaca telah mendapatkan pemahaman tentang *Community of Practice* (CoP), maka dalam artikel kali ini pembaca akan disuguhi cerita tentang *Public Sector Internal Auditors Community of Practice* (CoP). Cerita ini bermula ketika BPKP diundang sebagai pembicara dalam acara *OECD Auditors Alliance Launch Meeting 2018*

yang diselenggarakan di OECD Conference Centre, Paris, Perancis. *Auditors Alliance* adalah sebuah forum khusus bagi auditor internal dan eksternal sektor publik untuk berbagi wawasan dan keahlian tentang praktik audit mereka. Tujuannya ada tiga, antara lain menyatukan para auditor di sektor publik, menciptakan ruang untuk berbagi praktik yang lebih baik dan mengatasi tantangan dalam audit sektor

publik, dan memfasilitasi kemitraan institusional dalam semangat saling belajar dan adanya target kerjasama, menyesuaikan kebutuhan dan keterampilan berbagai auditor dan entitas audit.

Pondasi Legitimasi Kelas Dunia

Dalam acara *the launch meeting of the Auditors Alliance* pada 26 Maret 2018 lalu, Kepala BPKP Ardan Adiperdana diundang untuk berbicara mengenai inovasi pengawasan di sektor publik. Terbagi menjadi empat sesi, Ardan Adiperdana menjadi pembicara di sesi ke empat bersama dengan narasumber yang berasal dari Slovenia yaitu *President Court of Audit Republic of Slovenia* Tomas Vesel dan *Professional Practice Director Government Internal Audit Agency United Kingdom* Jo Rowley. Pada *launch meeting* itu, Ardan menyampaikan bagaimana pemerintah Indonesia telah mendudukan BPKP selaku auditor internal pemerintah dalam proses pengambilan keputusan di level nasional. Dengan hadir dalam rapat-rapat terbatas bersama Presiden, BPKP memahami proses pengambilan keputusan dan dapat memberikan masukan kepada pemerintah sedini mungkin. Dari hal tersebut juga BPKP dapat mendesain penugasan-penugasan pengawasan untuk menjawab kebutuhan Presiden.

Menghadiri Forum dan Menjadi Benchmark

Tidak berhenti disitu, inovasi pengawasan intern di Indonesia mendorong negara-negara lain untuk melakukan *benchmarking* ke BPKP dan APiP lainnya. Diawali dengan pelaksanaan *video conference* pada akhir tahun 2017, pada bulan April 2018, Delegasi Auditor Internal Brazil yang dipimpin oleh Liane Angoti melakukan kunjungan kerja ke BPKP

dan beberapa mitra kerja APiP, seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dan Inspektorat Kab. Sumedang. Dalam kunjungan selama satu minggu tersebut, para delegasi mempelajari langkah strategis BPKP dalam meningkatkan kapabilitas APiP ke level 3 IACM. BPKP dan delegasi yang hadir bertukar gagasan dan isu-isu seputar pengendalian internal untuk memperbaiki tata kelola di kedua negara.

Kemudian, di bulan yang sama, BPKP melakukan *video conference* dengan Central Coordinating Agency for Internal Audit, Ministry of Finance, Royal Government of Bhutan. Difasilitasi oleh World Bank, BPKP melakukan *video conference* guna membahas isu terkait kapabilitas, pembinaan kompetensi, dan perkembangan jabatan auditor internal di kedua negara. Diskusi tersebut melahirkan rencana kolaborasi peningkatan kapabilitas APiP yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU). Wacana kerja sama tersebut ditindaklanjuti kembali melalui *video conference* pada bulan April 2019 dengan membahas secara detil ruang lingkup kerja sama untuk dituangkan ke dalam MoU yang ditandatangani pada bulan Oktober 2019.

Lalu, di bulan Juni 2018, Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nurdin menjadi narasumber dalam *the 2018 ACIIA Forum Internal Auditors in The Public Sector* di Manila, Filipina. Forum tersebut membahas *best practices* audit internal sektor publik di berbagai negara. Melalui forum ini diharapkan



menghasilkan berbagai gagasan untuk meningkatkan kontribusi peran audit internal dalam mewujudkan efisiensi dan *good governance*. Di tahun yang sama, tepatnya pada 15-17 Oktober 2018, diselenggarakan acara *Fourth High-Level Meeting on Country-Led Knowledge Sharing HLM4* dengan tema “*Local Innovation as a Driver for Global Development*” di Nusa Dua Bali. Dalam acara tersebut, Sekretaris Utama BPKP Dadang Kurnia menjadi salah satu pembicara dalam *High-Level Panel Discussion*. Selain menjadi narasumber, BPKP juga dipercaya untuk membawa para delegasi *The 4th High Level Meeting on Country Led Knowledge Sharing (HLM4)* mengunjungi Kabupaten Badung, Provinsi Bali, untuk mempelajari tata kelola di kabupaten tersebut. Para delegasi mempelajari bagaimana Kabupaten Badung mengimplementasikan sistem pengendalian intern, penguatan kapabilitas APiP, serta SIMDA dan Siskeudes. Selain itu, BPKP juga membawa delegasi untuk melihat secara langsung implementasi dan manfaat Dana Alokasi Khusus (DAK)



infrastruktur berupa pembangunan pipa distribusi air bersih ke rumah-rumah penduduk di Desa Sading dan implementasi Siskeudes di Desa Mengwi. Pada kesempatan tersebut, disampaikan pula mengenai peran BPKP Perwakilan Bali dalam membantu Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan kapabilitas APiP sehingga dapat mencapai Level 3.

Bersinergi dengan Asia Tenggara dan Pasifik
 Pada awal tahun 2019, BPKP membangun sinergi dengan *Korean Development Institute*, sebuah institut yang dibentuk sejak 1971 dengan tujuan untuk melakukan penelitian kebijakan dan analisis tentang masalah ekonomi dan sosial yang mendasar menggunakan metode ilmiah untuk mendukung upaya pembangunan Korea Selatan. Sinergi tersebut dilakukan dalam bentuk *knowledge sharing program* dengan berfokus pada diskusi dan *insight* seputar sistem pengendalian intern yang berjalan di kedua negara. Kerja sama yang bertujuan



untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah melalui penguatan fungsi audit internal ini berjalan selama satu tahun. Melalui berbagai aktivitas, seperti diskusi pembahasan studi kasus di masing-masing negara, seminar, dan kajian, pihak KDI memberikan masukan terhadap pengendalian intern di Indonesia yang terbagi ke dalam tiga proyek, yaitu *Capacity Building Policy of BPKP'S Internal Auditing in Indonesia: Focused on Organizational Structure and Auditor Training Performance, Strengthening Internal Control System in Government: Lesson from Korean Government, dan Consultation for Audit Process in E-Finance System*. Selain itu, pada bulan Juni 2019, BPKP menerima kunjungan kerja *Association of Government Internal Auditors (AGIA) Filipina*. *President of AGIA* Josie Jane bersama delegasi lainnya melakukan studi banding atas *internal audit best practices* di Indonesia melalui BPKP untuk mendapatkan masukan dalam membangun struktur lembaga audit internal pemerintah yang kokoh di negaranya.

Epilog
 Merajut cerita-cerita di atas, koordinasi dan sinergi yang telah dilakukan oleh BPKP baik dengan negara-negara maupun organisasi internasional menjadi bukti bahwa CoP terkait internal audit sektor publik seperti yang telah dibangun oleh OECD melalui *Auditor Alliance* dapat juga dibentuk di level nasional dan regional. Di level nasional telah dimulai dengan pembentukan Aliansi Auditor Intern Indonesia (AII) oleh BPKP bersama dengan Asosiasi dan Lembaga Auditor Intern dari berbagai sektor. Tujuannya tentu membentuk kelompok auditor internal sektor publik yang berpartisipasi dalam aktivitas komunal, dan secara terus-menerus menciptakan identitas bersama melalui keterlibatan dan kontribusi terhadap praktik-praktik auditor internal sektor publik, secara bersama-sama menerima manfaat guna membangun dan memperkuat pengawasan intern di negaranya masing-masing. Menyikapi hal positif seperti ini, tentu pembaca mendukung kan?

Delegasi Auditor Internal Brazil melakukan kunjungan ke BPKP

BPKP menerima kunjungan kerja Association of Government Internal Auditor (AGIA) Filipina

Video conference antara BPKP dan Central Coordinating Agency (CCA) of Internal Auditor Bhutan

Foto
 Dok. Kominfo BPKP



Auditor BPKP selalu siap melaksanakan penugasan meskipun medan yang dilalui seringkali tidak mudah, seperti yang dilakukan pada saat pelaksanaan cek fisik sebagai bagian dari Reviu Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan PLTA Jatigede, Sumedang (10 Maret 2018).

Foto
Betrika Oktaresa



Tim Evaluasi Perwakilan BPKP DIY melakukan konfirmasi atas Bantuan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Kabupaten Bantul di Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan guna meyakinkan bahwa bantuan telah tepat sasaran, manfaat, dan tujuan.

Foto
Danie Yanuar

Regional Internal Audit Workshop di Atas Awan

Arief Tri Hardiyanto,
Direktur Investigasi I, Deputi Investigasi BPKP

Ilustrasi
Petrus Sonny

Senin, 26 Agustus 2019, pukul 07.00 waktu setempat, pesawat Druk Air yang kami tumpangi dari Bangkok mendarat di Bandara Internasional Paro, Bhutan, salah satu bandara yang letaknya tertinggi di dunia. Dengan posisi landasan di ketinggian sekitar 2.235 meter di wilayah timur pegunungan Himalaya, bandara ini terkenal dengan kesulitan yang cukup tinggi untuk pendaratan. Tentu saja, hal ini menjadikan proses pendaratan pesawat menuju landasan menjadi cukup menantang karena harus melewati celah yang relatif sempit di antara hamparan gunung-gunung yang merupakan bagian dari pegunungan Himalaya. Setelah melewati proses imigrasi yang sangat mudah dan cepat, perjalanan dilanjutkan melalui darat di jalan yang dibangun di lereng gunung sepanjang 56 km ke Thimphu, ibukota negara Bhutan, tempat diselenggarakannya *Regional Workshop*.

Regional Internal Audit Workshop bertajuk “*Government Internal Audit: Embracing the Changes and Innovation*” berlangsung selama dua hari sejak 27 sampai dengan 28 Agustus 2019 bertempat di Hotel Le Meridien, Thimphu. *Workshop* ini diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan-nya Pemerintah Kerajaan Bhutan dengan tujuan untuk mempelajari praktik internal audit pemerintah di regional Asia dan mendapatkan materi topik-topik terkini dari pembicara baik dari sektor publik maupun sektor privat. Peserta *workshop* sebagian besar berasal dari Pemerintah Bhutan yaitu para internal auditor pada seluruh kementerian di Bhutan, auditor pada *Central Coordinating Agency for Internal Audit Service* Kementerian Keuangan, dan Komisi Anti Korupsi. Selain itu, hadir juga peserta dari kantor World Bank Perwakilan Bhutan, India, dan Indonesia serta *Austrian Development Cooperation* dan *European Union*. Narasumber dari pihak eksternal berasal dari konsultan Ernst and Young LLP, BPKP, Institute of Internal Auditors Malaysia, Institute of Chartered Accountant India, Financial Comptroller General Office Nepal, dan Kementerian Keuangan Sri Lanka.

Sekretaris Kementerian Keuangan Bhutan Nim Dorji dalam pembukaan *workshop* menyatakan dua

tantangan utama yang dihadapi Unit Internal Audit Kementerian Keuangan Pemerintah Bhutan adalah meningkatkan kompetensi internal auditor dan menahan mereka untuk tetap bekerja sebagai internal auditor. Peningkatan kompetensi sangat diperlukan mengingat para auditor pada awalnya ditunjuk tanpa ada pelatihan dasar audit internal. Di samping itu, karena keterbatasan jumlah internal auditor maka unit internal audit di setiap kementerian hanya dikelola oleh satu internal auditor saja. Padahal, mereka juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih luas (*multi-task*) di kementerian. Di sisi lain, pemerintah Bhutan tidak memiliki lembaga pelatihan khusus untuk internal auditor. Saat ini jumlah keseluruhan internal auditor adalah 48 orang yang tersebar di 32 unit internal audit yang berada di 10 kementerian, 20 Dzongkhags (distrik), dan 2 lembaga otonom.

BPKP Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman
BPKP dalam acara tersebut diberikan kesempatan awal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang perkembangan internal audit pemerintah di Indonesia. Jumlah lembaga pengawasan internal pemerintah di Indonesia sebanyak 628 unit yang terdapat di setiap kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, termasuk keberadaan

BPKP sebagai auditor presiden. Jumlah auditor internal keseluruhan sekitar 13.000 orang cukup memberikan impresi awal yang kuat bagi para peserta terhadap keberadaan internal auditor pemerintah di Indonesia. Belum lagi, informasi tentang berdirinya Djawatan Akuntan Negara pada tahun 1936, yang kemudian berevolusi menjadi Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara pada tahun 1966, dan setelah itu menjadi BPKP pada tahun 1983, memberikan pemahaman yang mendalam akan pentingnya persistensi dalam evolusi kelembagaan internal audit pemerintah untuk memperkuat independensi.

Kemudian terkait kerangka legal, BPKP menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menjadi salah satu *milestone* dalam reformasi pengelolaan keuangan negara, juga menjadi dasar pengembangan APIP di Indonesia.

Berdasarkan PP 60/2008, menjadi kewajiban seluruh pimpinan instansi pemerintah di Indonesia untuk mengimplementasikan SPIP. Kemudian, APIP mengemban peran yang strategis dalam penguatan efektivitas implementasi SPIP melalui pengawasan intern.

Pengembangan dua pilar akuntabilitas tersebut setelah lebih dari 5 tahun kemudian dipandang perlu untuk dilakukan pengukuran berupa tingkat maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP. Komitmen yang tinggi dari Presiden untuk pengembangan APIP dan SPIP diwujudkan dengan ditetapkannya target Level Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP dalam RPJMN 2015-2019. Boleh dikatakan periode 5 tahun terakhir merupakan “Periode APIP” karena adanya upaya nasional yang serentak, terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan dalam peningkatan kapabilitas APIP. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat membentuk budaya pengendalian dan risiko di lingkungan instansi pemerintah.

Komitmen yang tinggi dari Presiden untuk menjaga akuntabilitas kegiatan/program pembangunan juga diwujudkan dengan dimintanya BPKP untuk mengikuti sidang-sidang kabinet membahas isu-isu strategik nasional. Keikutsertaan BPKP dalam sidang kabinet memberikan perspektif yang lebih luas sehingga dapat memahami dengan baik kontekstual untuk dapat meningkatkan kualitas kegiatan internal audit. Mengakhiri paparannya, BPKP menguraikan beberapa tantangan berupa peningkatan kompetensi auditor dan pengembangan bisnis proses berbasis teknologi informasi untuk dapat memberikan informasi yang valid, relevan, dan cepat kepada *stakeholders* utama.

Knowledge Sharing dari Negara-Negara lain
Narasumber dari beberapa negara memaparkan praktik audit pemerintah di negara masing-masing yang dalam beberapa hal cukup memberikan *insight* kepada para peserta. Keberadaan Komite Audit di Sri Lanka cukup menarik untuk dipahami lebih lanjut. Komposisi struktur Komite Audit relatif telah dibakukan, terdiri dari Ketua yaitu pimpinan institusi, dengan anggota *Chief Accountant*, wakil dari *Treasury*, *Chief Internal Auditor*, dan perwakilan dari *Auditor General* sebagai pengamat. Lalu, mekanisme kerja komite juga telah dilakukan standarisasi.

Informasi menarik lainnya adalah penerapan *risk based audit* yang telah dipraktikkan oleh internal auditor pemerintah di Malaysia, Nepal, dan India. Pada umumnya penerapan *risk based audit* tersebut masih dalam tataran perencanaan audit. Hal yang sama juga dialami internal audit dalam penggunaan IT, yang menjadi bahan diskusi yang sangat hangat di *workshop* tersebut. Para narasumber menyatakan bahwa pemerintah negara mereka sangat *concern* terhadap penggunaan IT dan terus mengembangkan penguatan infrastruktur IT termasuk kompetensi auditornya. Hal ini relevan dengan materi yang disampaikan pemateri selanjutnya yaitu konsultan Ernst & Young. Pemateri tersebut membawakan tiga topik yang sangat relevan dengan kebutuhan internal auditor dalam menyongsong era industri 4.0 yaitu *Digitizing or Automatization of the Internal Audit Function*, *Data Analytics in Internal Audit and Technology driven Innovative approaches in Internal Audit*. Menurut mereka, teknologi berkembang sangat cepat dan memengaruhi hampir seluruh bagian dan operasi organisasi. Kegiatan operasional berubah saat organisasi berinovasi. Perkembangan teknologi baru dan dorongan untuk berinovasi serta bertransformasi digital memberikan tantangan bagi fungsi internal audit untuk tetap relevan. Oleh karena itu, internal auditor harus dapat beradaptasi, berkembang, dan bertransformasi sebelum menjadi tidak relevan.

Fungsi internal audit perlu memikirkan kembali bagaimana mereka melakukan pekerjaan dengan cara yang lebih tangkas/gesit dan bagaimana mereka dapat memanfaatkan proliferasi data dan teknologi untuk mencapai tujuan menjaga efektivitas manajemen risiko secara lebih efisien. Transformasi internal audit



BPKP berkesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di acara Regional Internal Audit Workshop bertempat di Hotel Le Meridien, Thimphu, Bhutan

Foto
Arief Tri

dilakukan melalui otomatisasi *Audit Management System* (AMS), *Computer Assisted Audited Techniques* (CAATs), *Robotic Process Automation* (RPA), *Artificial Intelligence* (AI), dan suatu *blockchain*.

Data analitis dalam Internal Audit menjadi hal yang sangat relevan. Dengan data analitis, auditor dapat melakukan proses inspeksi, pembersihan, transformasi, dan memodelkan data sehingga memungkinkan untuk memberikan penekanan pada informasi yang berguna, memberikan konklusi, dan mendukung pengambilan keputusan.

Dalam paparan terakhir, Ernst and Young memberikan introduksi bagaimana inovasi dalam audit internal dapat dilakukan dengan berbasiskan teknologi. Ada tiga area untuk inovasi dalam fungsi internal audit yaitu area tata kelola, metodologi, dan *enabling* teknologi. Dalam area tata kelola inovasi dapat dilakukan dalam Visi Strategis Internal Audit, struktur organisasi, manajemen sumber daya dan talenta, serta keselarasan kegiatan asuran. Dalam area metodologi audit, inovasi dapat dilakukan dalam asesmen risiko dinamis, pendekatan audit yang tangkas (*agile audit approach*), pelaporan, dan pemantauan berkelanjutan (*continuous monitoring*). Dalam area *enabling technology*, inovasi berupa *advance analytic*, *robotic process automation*, *process mining*, serta

machine learning (ML) dan *artificial intelligent* (AI).

Public Sector Internal Audit Community of Practice

Rangkaian dua hari *workshop* memberikan pemahaman yang sama di antara peserta dari berbagai negara akan pentingnya membangun kapabilitas internal auditor pemerintah secara berkelanjutan. Pemahaman ini dituangkan dalam suatu konsensus bersama tentang perlunya pembentukan *Public Sector Internal Audit Community of Practice* sebagai media saling bertukar pengalaman dan pengetahuan akan praktik-praktik internal audit di sektor publik. Hal ini juga mendapatkan dukungan oleh Menteri Keuangan Bhutan Namgay Tshering, yang disampaikan dalam acara penutupan *workshop*. Namgay juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan dan dukungan sumber daya manusia yang berkompeten. Di samping itu, hal menarik yang disampaikan adalah bahwa Bhutan tidak menggunakan GDP sebagai ukuran perekonomian negara tapi menggunakan *Gross National Happiness* (GNH). Dan tata kelola yang baik merupakan pilar keempat dari GNH.

KOMITMEN PERAN AKTIF STAKEHOLDER LRT JABODEBEK



02
07

Pelaksana Tugas Kepala BPKP Iswan Elmi didampingi oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nurdin hadir dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan LRT Jabodebek di Kementerian Koordinator Kemaritiman. Pada rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B. Panjaitan ini disepakati agar para *stakeholder* LRT Jabodebek berperan aktif sesuai tupoksinya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan LRT sehingga solusi kemacetan ibukota dapat segera teratasi. Hadir pula dalam rapat tersebut Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

CLOSING MEETING AUDIT ISO GCG BPKP

09
08

Closing Meeting Surveillance Audit (SA) Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan Tim Auditor SA dari PT TUV NORD Indonesia berlangsung di Library Cafe Kantor BPKP Pusat. Tim Audit SA PT TUV NORD Indonesia Faber Siahaan menyampaikan apresiasi atas komitmen BPKP yang secara konsisten menerapkan ISO secara teratur. Ia menyampaikan hasil SA yang menunjukkan tidak adanya Non Comformity, baik tingkat minor maupun major. Oleh karena itu, Deputi Bidang Akuntan Negara dinyatakan masih mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 Asesmen GCG BUMN.

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Bonny Anang Dwijanto selaku *Top Management* menyambut baik adanya SA dari PT TUV NORD Indonesia dan mengapresiasi upaya-upaya asesor BPKP yang berhasil menjaga pelaksanaan mutu ISO 9001:2015. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Auditor SA PT TUV NORD Indonesia atas audit yang dilakukan dan pemberian saran bagi BPKP. Bonny menyampaikan komitmen BPKP untuk tetap menjaga mutu pelaksanaan Asesmen GCG agar tetap berstandar internasional dan mutu hasil *assessment* GCG yang andal.

INTERKONEKSI OM-SPAN DAN SISKEUDES SEDERHANAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



19
08

Dalam rangka penyederhanaan mekanisme penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengoordinasikan interkoneksi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)* dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan BPKP. Peluncuran dilaksanakan di Hotel Borobudur dan dihadiri oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto beserta jajaran, kementerian/lembaga terkait, beberapa bupati, kepala dinas, administrator Siskeudes, mitra pembangunan, dan LSM. Selain dapat mempercepat pemenuhan persyaratan penyaluran dan memudahkan pertanggungjawaban Dana Desa, melalui interkoneksi ini diharapkan tidak terjadi duplikasi input data, mengurangi risiko kesalahan, menghemat sumber daya, dan memperjelas tanggung jawab pengisian data laporan output dan penggunaan Dana Desa.

11 07 KOREA DEVELOPMENT INSTITUTE PAMIT

Menutup proyek kerja sama selama satu tahun bersama Korea Development Institute (KDI), BPKP menyelenggarakan *final meeting* di Kantor Pusat BPKP. *Head of Senior Advisor Knowledge Sharing Program (KSP)* Joo Young Jin menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah melalui penguatan fungsi audit internal. Atas laporan final yang disampaikan, Sekretaris Utama BPKP Dadang Kurnia mengatakan hal itu menjadi masukan yang akan dikaji untuk peningkatan kualitas pengawasan BPKP ke depannya. Adapun Deputi



Kepala BPKP Bidwas Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Nurdin sangat mengapresiasi kedatangan tim delegasi KDI dan berharap silaturahmi dalam *knowledge sharing* dapat terus terjalin. Usainya kerja sama ini bukanlah yang terakhir antara BPKP dan KDI, melainkan gerbang bagi kerja sama lain di masa yang akan datang.

BPKP BERI SARAN DALAM RDP PENGAWASAN PENGELOLAAN INVESTASI

20
08

Mewakili Pelaksana Tugas Kepala BPKP, Deputi Kepala BPKP Bidang Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Nurdin, Deputi Kepala BPKP Bidang Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK Ernadhi Sudarmanto, dan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Bonny Anang Dwijanto hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK), DJSN, dan BPKP. Membahas dana investasi BPJS Ketenagakerjaan dan hasil pengawasan terhadap dana investasi, Deputi Bidang Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK Ernadhi Sudarmanto menyatakan bahwa sejauh ini belum ada hasil pengawasan yang dilakukan oleh

BPKP atas dana investasi pekerja pada BPJS TK. Atas rencana pemerintah untuk melonggarkan aturan batasan investasi BPJS TK, BPKP menyarankan bahwa kebijakan harus mengacu pada kerangka tata kelola investasi (*investment governance framework*). Selain hasil yang tinggi, investasi BPJS TK juga harus dikelola secara akuntabel dan berhati-hati. Ernadhi juga menyampaikan bahwa investasi BPJS TK harus menghasilkan manfaat yang besar bagi peserta melalui integrasi pengelolaan investasi dan penasehatan keuangan, serta pemberian akses kepada peserta atas saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diinvestasikan oleh BPJS TK.

KOMPUTER FORENSIK BPKP JADI *TRENDSETTER*

21
08

Merespon maraknya *computer-related crime*, UU Tipikor dan UU ITE mengizinkan informasi dan/atau data elektronik menjadi alat bukti hukum yang sah dan bisa digunakan dalam hukum acara di Indonesia. Deputi Bidang Investigasi BPKP telah membangun Laboratorium Komputer Forensik yang membantu Aparat Penegak Hukum untuk mendapatkan bukti dokumen elektronik. Inovasi pengawasan ini telah berkali-kali berhasil menyediakan bukti analisis dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi bersama dengan penyidik dan mendorong beberapa kementerian, lembaga, dan institusi

lainnya melakukan studi tiru manajemen forensik digital BPKP. Tim Direktorat E Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, salah satunya. Rombongan yang dipimpin oleh Direktur E Jamintel Kejaksaan Agung RI Ade Adhyaksa ini disambut oleh Direktur Investigasi IV Buntoro, beserta jajarannya di Kantor Pusat BPKP. Dua aktivitas yang dilaksanakan, yaitu *digital forensic* dan *digital investigation*. “Studi tiru ini menjadi sarana *sharing knowledge* terkait peran forensik digital dalam tindak pidana korupsi, serta sarana membangun jejaring antar instansi,” ujar Buntoro.



Laboratorium Komputer Forensik membantu mengungkap kasus tindak pidana korupsi dengan menyediakan bukti analisa terhadap barang bukti elektronik

Foto
Adithia

Berkomunikasi Dalam Tim

Minwas Punya Tipsnya

Bagi Auditor, komunikasi sangatlah penting karena kegiatan pengawasan menyangkut proses perolehan dan penyampaian informasi, yang diperlukan guna **mencapai tujuan audit**. Nah, penting bagi Ketua Tim **menguasai ilmu komunikasi** yang memadai. *Why?* karena Ketua Tim tidak hanya berkomunikasi dengan auditan saja, tetapi juga harus mampu mengelola **komunikasi internal timnya**.



Oleh karena itu, ada **3 kemampuan berkomunikasi** yang harus dikuasai Ketua Tim.



Ketua Tim harus bisa **memilih diksi**

- Intonasi suara
- Gaya komunikasi yang mendukung **efektivitas** penyampaian pesan

Misalnya: untuk memastikan pemahaman anggota timnya atas program kerja audit (PKA) yang disusun, Ketua Tim bertanya "Kira-kira, bagaimana PKA kita ini, ada masukan?" Pengucapan kalimat dengan nada bertanya yang pas dan penggunaan kata "kita" akan menyiratkan keterlibatan setiap Anggota Tim sehingga mereka termotivasi untuk memberikan *feedback*.

Ilustrasi
Diana Pertiwi



Dalam menyampaikan hasil-hasil pengawasan, Ketua Tim perlu menguasai teknik komunikasi lisan dan tertulis.

Kemampuan tertulis



Ketua Tim melakukan penyuntingan (*proofread*) dokumen hasil pengawasan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pengetikan yang dapat mengurangi akurasi informasi yang disampaikan.

Kemampuan Lisan

Menurut **morphopsychologist** dan **grafologis Martine Tardy**

kata-kata hanya memiliki peran sebanyak **7%**

Intonasi suara berperan sebesar **38%**

Postur tubuh seperti gerakan, ekspresi wajah, serta penampilan fisik **55%**

Ketua Tim perlu merencanakan paparan **hasil pengawasannya**. Memberi kesempatan Anggota Tim untuk membantu menjelaskan sangat penting untuk menambah pengalaman mereka. Ketua Tim dapat menempatkan anggota tim yang belum berpengalaman untuk memaparkan bagian pembukaan, alih-alih bagian penutup yang biasanya dinilai **lebih sensitif**.



Seringkali hubungan kerja yang kuat terbangun dari **aktivitas komunikasi informal**, misalnya: makan/ngopi bareng. Selain itu, jika para anggota timnya memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, Ketua Tim dapat **menginisiasi** Program Pengembangan Mandiri (PPM) yang mendorong para Anggota Tim untuk berbagi keahliannya baik secara internal di **dalam tim** maupun kepada **mitra kerja**.

Sumber : Internal Auditor | Oktober 2019

BUDAYA DAN KONTEKS LOKAL DALAM SISTEM PENGENDALIAN

Berkaca dari Sistem Pengendalian Transportasi di Beberapa Negara

Betrika Oktaresa,

Kepala Subbagian Informasi Publik BPKP dan Pegiat Manajemen Risiko

Kebanyakan sistem dan proses yang ada di Indonesia merupakan adaptasi dari konsep yang berkembang di negara-negara maju. Hal itu berlaku baik organisasi yang bergerak di sektor swasta maupun organisasi sektor publik di Indonesia. Dalam perspektif tata kelola misalnya, konsep *corporate governance*, *performance measurement*, *risk management*, dan *internal control system*, ramai-ramai diadopsi oleh perusahaan dan instansi pemerintah. Bukan upaya yang salah memang, mengingat keberhasilan konsep tersebut diterapkan di negara-negara asalnya. Namun, benarkah konsep itu merupakan konsep yang *plug and play*, yang bisa langsung diaplikasikan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lainnya? Budaya dan konteks lokal misalnya.

Konsep *Balanced Scorecard* (BSC) bisa menjadi contohnya. BSC pada awalnya digadag-gadag sebagai terobosan baru yang efektif untuk mengukur kinerja organisasi, belakangan ramai-ramai dinilai tidak optimal diterapkan di Indonesia. Ternyata, konsep yang sukses di negara asalnya itu tidak bisa secara serta merta diterapkan di Indonesia karena karakteristik yang berbeda. Demikian juga dalam penerapan sistem pengendalian, ternyata tidak sama aplikasinya antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam tulisan ini, akan difokuskan pada aplikasi sistem pengendalian yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, khususnya pada sistem pengendalian dalam transportasinya, merujuk pada pengalaman penulis ketika memanfaatkan transportasi di negara-negara yang akan dibahas di bawah ini.

Sistem Transportasi dan Pengendalian

Secara umum, tujuan pengelolaan sistem transportasi di setiap negara adalah identik yaitu menyediakan



Bus merupakan transportasi yang tepat untuk menikmati hiruk pikuk Kota London

Foto Betrika Oktaresa

pelayanan transportasi publik yang baik. Risiko yang dihadapi pun sama yaitu penumpang yang menggunakan moda transportasi tanpa membeli tiket. Risiko ini tentu menjadi sebuah risiko yang harus dimitigasi oleh pengelola dengan penerapan sistem pengendalian. Namun, meskipun risikonya sama, sistem pengendalian yang diterapkan ternyata berbeda. Sebagai contoh, Sistem transportasi di United Kingdom (UK). Dari sisi pengendaliannya, pada jenis transportasi kereta dan *tube*, pengendalian yang dipilih adalah penggunaan pintu yang hanya dapat dibuka jika penumpang telah melakukan *tapping* dengan kartu. Lalu, untuk jenis transportasi bus biasanya setiap penumpang yang akan naik masuk lewat pintu depan dan melakukan *tapping* dengan kartu yang prosesnya diawasi oleh sang supir,

atau menggunakan uang *cash* yang diserahkan langsung ke sang supir. Bergeser ke Kota Paris, Perancis, kita akan disuguhi salah satu sistem transportasi publik yang paling efisien di dunia. Kereta biasanya tiba tepat waktu, bus-bus ditata dengan baik dan bersih, dan *commuter express* (“RER”) merupakan salah satu moda transportasi yang paling dapat diandalkan, cepat dan tepat waktu. Hampir sama dengan sistem pengendalian yang diterapkan di UK, pengendalian yang dilakukan di Paris juga identik, karena menggunakan *gate* sebagai *filter*, dimana hanya penumpang yang memiliki tiket yang bisa masuk ke dalam moda transportasi, terutama kereta dan RER. Demikian juga pada jenis transportasi bus, akses masuk penumpang melalui pintu depan dengan pengawasan sang pengemudi. Meluncur ke Selatan, petualang berlanjut ke Kota Milan, Italia. Pilihan transportasi umum pun tak jauh berbeda, ada kereta bawah tanah, bus, dan trem. Untuk kereta bawah tanah, sistem pengendaliannya hampir sama dengan sistem *tube* di UK (London) dan RER di Paris. Sedangkan untuk bus dan trem ternyata menggunakan pendekatan yang berbeda. Meskipun sebenarnya penumpang harus memiliki tiket yang valid dan dilakukan validasi di mesin yang tersedia, namun ada celah bagi penumpang yang ‘nakal’. Hal ini karena pengemudi bus dan khususnya trem, tidak dapat mengawasi seluruh penumpang terutama yang masuk tidak dari pintu paling depan. Lalu, pengendalian seperti apa yang diterapkan? Konon katanya, untuk moda trem dan bus, akan ada petugas inspeksi yang secara *random* akan memeriksa dan mengawasi para penumpang. Tapi sejauh penulis menggunakan moda itu beberapa hari,

tidak pernah sekalipun menemui sang petugas inspeksi tersebut. Malahan, penulis pernah 'ditanya' oleh sesama penumpang apakah sudah melakukan validasi tiket atau belum. Hal ini merupakan hal baru tentunya, artinya pengendalian yang terbangun justru berbentuk pengendalian dari sesama penumpang, bukan melalui *control by formal system*.

Petualangan berakhir pada sebuah negara di wilayah Eropa Tengah yaitu Republik Ceko, khususnya di Kota Praha. Di kota itu, selain kereta bawah tanah, terdapat beberapa jenis transportasi lain seperti bus dan trem. Dari sisi sistem pengendaliannya, transportasi di Praha menerapkan pendekatan yang berbeda. Baik pada kereta bawah tanah, bus, dan trem, tidak menerapkan sistem *gate* ataupun pengawasan dari pengemudi bagi penumpang yang akan naik. Penumpang hanya cukup membeli tiket yang valid dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan pilihan penumpang, misalnya 90 menit, 120 menit, sampai dengan 7 hari. Penumpang cukup melakukan validasi ke alat yang ada sebanyak satu kali sebagai penanda *start* dimulainya penggunaan tiket tersebut sesuai durasinya, dan dapat digunakan untuk menaiki ketiga jenis alat transportasi tersebut. Artinya, penumpang boleh menggunakan sarana transportasi yang ada selama durasinya masih valid. Bagaimana pengendaliannya untuk memastikan penumpang memiliki tiket yang masih valid? Pemerintah di sana memilih untuk menggunakan *random inspection* untuk memastikan penumpang bertiket valid. Menariknya, selama dua hari menggunakan ketiga jenis alat transportasi tersebut, tidak sekalipun saya bertemu dengan pak *inspector*. Ancaman bagi yang tidak bertiket?



Akan dikenakan denda yang besarnya puluhan kali lipat dari harga tiket yang seharusnya dibayar.

Penutup

Setelah berpetualang ke beberapa negara di atas, terdapat poin penting yang dapat kita simpulkan. Pertama, dengan tujuan yang sama, risiko yang sama, dan jenis transportasi yang hampir sama, beberapa negara tersebut menerapkan pengendalian yang berbeda. Tampaknya, budaya dan konteks lokal di masing-masing negara berpengaruh kepada pemilihan sistem pengendalian. Tentu, akan menarik jika kita melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait pemilihan sistem pengendalian tersebut. Kedua, refleksi dalam tulisan ini dapat menjadi acuan bagi perancang (*designer*) sistem pengendalian ketika memilih sistem pengendalian yang akan diterapkan, bahwa perlu memerhatikan budaya dan konteks lokal dalam pembangunan sistem pengendalian yang dipilih.



Ilustrasi
Diana Pertiwi

Pemda Berpeduli Risiko: Antara Harapan dan Tantangan

Ilham Nurhidayat,
Kasubdit PAEP pada Deputi Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah yang mengarah pada *clean and good governance*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), secara garis besar menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko (*risk assessment*) dengan



cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan kegiatan.

Penilaian risiko pada instansi pemerintah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya pasal 13 sampai dengan pasal 17. Dalam PP tersebut, dinyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Dalam Lampiran PP Nomor 60 Tahun 2008, tentang Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian II Penilaian Risiko disebutkan bahwa “*Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan (pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan), baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko*”.

Setiap aktivitas tentunya tidak akan

terlepas dari adanya risiko, termasuk dengan aktivitas yang dilakukan instansi pemerintah. Risiko bersifat melekat pada setiap aktivitas, oleh karena itu jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Bagaimana kita seharusnya bersikap? Pengelolaan atas risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP. Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risikonya, maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIP-nya. Apabila penyelenggaraan SPIP baik, diharapkan tata kelola pemerintah juga akan baik.

Risiko dan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko pada pemerintah daerah dapat dipahami sebagai suatu kombinasi antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan oleh suatu pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko. Dalam penerapan pengelolaan risiko, terdapat dua hal penting yang perlu menjadi perhatian yaitu pembangunan/ perbaikan Lingkungan Pengendalian yang mendukung penciptaan budaya dan sistem pengelolaan risiko, dan implementasi unsur Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan menunjukkan pelaksanaan proses pengelolaan risiko.

Kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah meliputi empat aspek penting. *Pertama*, Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko. *Kedua*, Penetapan Struktur Analisis Risiko. *Ketiga*, Penetapan Kriteria Penilaian Risiko. *Keempat*, Penetapan Struktur Pengelolaan Risiko. Dalam rangka memberikan panduan bagi



Pemerintah Daerah mengelola risiko pemerintah daerah mulai dari risiko strategis pemda, risiko strategis OPD, dan risiko operasional, BPKP dalam hal ini Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah berinisiatif menyusun sebuah Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan risiko pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib/pilihan. Pedoman tersebut dituangkan dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah.

Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah tersebut mencakup dan mengatur tentang proses, tahapan pengelolaan risiko dan pelaporan pengelolaan risiko. Pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para *Stakeholder*, khususnya Pemerintah Daerah sebagai pertimbangan dalam pengelolaan risiko dalam rangka peningkatan kualitas

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pedoman tersebut memuat pengaturan pengelolaan risiko, struktur pengelola risiko, dan proses pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Daerah. Pengelolaan risiko dilakukan pada tingkat strategis Pemda, strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan tingkat operasional OPD.

Keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dan Pengawasan Intern Berbasis Risiko

Dokumen penilaian risiko yang telah disusun dan diformalkan, selain dijadikan sebagai panduan dalam mengelola risiko, dalam kerangka Pengawasan Intern Berbasis Risiko, Inspektorat (APIP Daerah) juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengawasan atau PKPT berbasis risiko. Saat ini Pedoman Intern Berbasis Risiko untuk Pemerintah Daerah juga sedang disusun dan diharapkan dalam waktu dekat dapat dijadikan panduan bagi pemda dalam mengimplementasikannya di APIP daerahnya masing-masing.



Mahadaya MAHADATA

Gilang Rahmat Hastanto,
Auditor pada Biro Hukum dan Komunikasi

“Data! Data! Data!” he cried impatiently. “I can’t make bricks without clay.” – Sherlock Holmes, The Adventure of The Cooper Beeches (1892)

Semenjak awal peradaban, manusia sudah menyadari pentingnya data dan pemanfaatannya. Salah satu contohnya, data-data pergerakan bintang dicatat dan dianalisa dalam ilmu astronomi, yang merupakan cabang sains tertua. Pengumpulan data dan informasi dalam astronomi ini sudah bermula semenjak zaman prasejarah dan terus berkembang

hingga saat ini. Contoh pemanfaatannya, untuk menentukan penanggalan, kapan waktu terbaik untuk menanam tanaman tertentu dan menentukan arah dalam melaut. Dalam konteks lokal di Indonesia, peradaban Jawa kuno juga memiliki versinya sendiri yaitu *Pranata Mangsa*, kitab primbon yang berisi kompilasi olahan data hasil pengamatan leluhur terhadap fenomena alam yang bisa diacu untuk

memulai masa tanam dan melaut.

Di era masa kini, pesatnya perkembangan teknologi membuat manusia semakin menyadari bahwa selain penting, data juga sangat berharga. Presiden RI Joko Widodo sendiri mengakui hal ini. “Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih berharga dari minyak,” ujarnya dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019 lalu.

Pernyataan Presiden tersebut relevan dengan data yang dirilis oleh Forbes, majalah bisnis terkemuka asal Amerika Serikat. Dalam daftar *Forbes Global 2000* yang dirilis pada Mei 2019, ada tiga perusahaan bergerak di bidang penyediaan data, berhasil menembus 10 besar perusahaan terbesar Amerika Serikat. Ketiga perusahaan tersebut adalah Apple, Microsoft, dan Alphabet (induk dari Google). Ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini telah mulai menyaingi perusahaan-perusahaan perminyakan seperti ExxonMobile dan Chevron yang juga bertengger di 10 besar daftar tersebut.

Kecanggihan teknologi informasi telah mempermudah pencatatan beragam data berjumlah besar dalam waktu singkat. Siapapun bisa mengakses dan juga mengirimkan data (baik sukarela maupun tidak) selama mereka terkoneksi. Perkembangan teknologi yang memudahkan penciptaan data ini pada akhirnya berkontribusi terhadap kemunculan beragam data dalam jumlah sangat besar yang terus dimutakhirkan secara *real time*.

Mahadata (*big data*) pun lahir dengan segala karakteristik uniknya. Kita semua tentu paham bahwa semakin banyak data yang ada berarti semakin banyak informasi yang berharga yang bisa diambil. Hingga pada akhirnya, orang pun mulai melirik peluang dalam pemanfaatan mahadata.

Apa itu Mahadata?

Istilah “*big data*” telah dikenal semenjak tahun 1990-an. John Mashey, seorang *computer scientist* asal Amerika Serikat, seringkali disebut sebagai orang yang mempopulerkan istilah ini. Secara sederhana, *big data* dapat diartikan sebagai himpunan data dalam jumlah yang sangat besar yang tidak mampu diolah dengan sistem komputer dan perangkat lunak konvensional serta memiliki karakteristik tertentu (LIPI, 2016). Adshad (2013) dalam “*Big Data Storage: Defining Big Data and The Type of Storage It Needs*” menjelaskan bahwa apa yang dewasa ini kita sebut dengan mahadata seringkali adalah kumpulan data tidak terstruktur yang memiliki ketergantungan pada *analytics* (dengan menggunakan mesin) untuk menyediakan

jawaban (informasi) yang dibutuhkan dalam hitungan detik. Dalam bahasa Indonesia, *Big Data* dapat diterjemahkan sebagai Mahadata, dengan empat karakteristik utama yang biasa disingkat dengan 4V, yaitu:

Volume, yang menjelaskan bahwa dalam mahadata, ukuran data yang dihasilkan sangat besar.

Variety, yang menjelaskan jenis, karakteristik dan sumber data dalam mahadata sangat beragam.

Velocity, yang berarti data dihasilkan dan diproses dengan sangat cepat untuk memenuhi permintaan dan tuntutan perkembangan zaman.

Veracity, yang merupakan karakteristik pengembangan dari mahadata yang mengacu pada kualitas dan nilai data.

Pengaruh Mahadata terhadap Dunia Audit Internal

Sedari mula ditemukan, profesi auditor sudah berkuat dengan data dan segala olahannya. Seberapa akurat simpulan hasil audit sangat tergantung pada seberapa akurat data yang tersedia. Ketika mahadata mulai dikenal, dunia audit

MAHADAYA MAHADATA



MAHADATA (BIG DATA)

adalah himpunan data dalam jumlah yang **sangat besar** yang **tidak mampu diolah** sistem komputer dan perangkat lunak **konvensional** serta memiliki **karakteristik tertentu** (LIPI, 2016)

KARAKTERISTIK MAHADATA

Dikenal juga dengan sebutan 4V yaitu **Volume, Variety, Velocity, dan Veracity** (Wikipedia)



Pemanfaatan mahadata tidak bisa dipisahkan dengan **data analytics**.

Data Analytics bertujuan mengungkap informasi mana saja yang **berharga** dari seluruh **populasi data** yang relevan (CPA Canada, 2018)

APA ITU MAHADATA



Ilustrasi
Aska & Gilang

pun melihat potensi yang dimiliki mahadata dalam membantu auditor melaksanakan tugasnya. Penggunaan mahadata berpijak pada prinsip bahwa semakin banyak yang diketahui dan dipahami tentang sesuatu, maka semakin andal juga wawasan (*insight*) yang diperoleh dan perkiraan yang dibuat mengenai

suatu kejadian (Marr, 2019). Hal ini sejalan dengan peran auditor yang diharapkan mampu memberikan wawasan dan masukan yang andal bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemanfaatan mahadata akan sangat membantu auditor dalam menjalankan perannya.

Pembahasan mengenai data bukan hanya mengenai data apa saja yang kita punya, melainkan juga bagaimana kita memanfaatkan data yang kita punya. Sebagaimana kita pahami bersama, jika data yang diolah lebih banyak, lebih beragam serta lebih mutakhir, maka hasil audit akan

bisa lebih bernilai. Tantangannya tentu auditor perlu mengerti bagaimana cara terbaik memanfaatkan mahadata guna memperoleh hasil yang lebih optimal. Hal ini karena karakteristik khas dari mahadata membuatnya tidak bisa diolah secara biasa, sehingga pemanfaatannya tidak bisa dipisahkan dengan apa yang disebut dengan *data analytics*.

CPA Canada (2018) menerangkan bahwa *data analytics* dalam audit bertujuan mengungkap informasi mana saja yang berharga dari seluruh populasi data yang relevan. Tujuannya bukan hanya untuk menjadikan audit lebih efisien, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hasil auditnya. *Data analytics* memungkinkan pelaksanaan prosedur audit yang lebih menyeluruh sehingga meningkatkan kemampuan dalam menilai risiko. Otomasi dalam *data analytics* juga dapat membantu auditor dalam memudahkan pekerjaannya. Auditor bisa lebih berfokus dalam melakukan pekerjaan yang membutuhkan penilaian profesional karena pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin telah dikerjakan dengan bantuan

teknologi. Dengan kata lain, *data analytics* mampu membantu auditor menghasilkan analisis dan pandangan yang lebih kaya dan bernilai bagi klien.

Perlu juga dicatat, untuk itu bisa memanfaatkan *data analytics* kita harus memiliki infrastruktur yang memadai. Data-data yang ada di dalam mahadata masihlah berupa data mentah. Agar bisa dimanfaatkan, data tersebut terlebih dahulu harus dipilah dan diolah terlebih dahulu. Hal ini tidak mudah mengingat ukuran (*volume*) dan keberagaman (*variety*) dari *big data* tersebut. Di sinilah pentingnya kita memiliki infrastruktur yang memiliki kapasitas besar untuk menampung mahadata tersebut dan mampu memproses pekerjaan *analytics* dalam waktu singkat. Tujuannya agar mahadata dapat diolah dan dipilah dengan cepat sehingga pihak-pihak yang berkepentingan bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari data-data tersebut sesegera mungkin.

Penutup

Kemunculan mahadata telah membuka peluang bagi perkembangan dunia audit ke tahap

selanjutnya. Namun, ibarat pisau bermata dua, kemunculan peluang tersebut juga dibarengi dengan munculnya tantangan besar, bagaimana cara terbaik memanfaatkan data tersebut. Mengingat teknologi masih dan akan terus berkembang, kita bisa yakin di masa depan, mahadata dan *data analytics* juga terus dikembangkan. Tentu saja hal ini berpotensi membuka peluang-peluang pemanfaatan baru. Kita bisa yakin bahwa jika dimanfaatkan dengan benar, mahadata memiliki potensi untuk menjadi mahadaya.

Untuk mengakhiri tulisan ini, izinkan penulis memplesetkan kutipan terkenal dari Uncle Ben pada film Spider-Man untuk menyimpulkan bahwa “*with big data comes big opportunities*”. Tetapi harus dicatat, bisa menembakkan jaring laba-laba dan menempel di dinding tidak serta merta menjadikan Anda pahlawan super, Anda harus tahu cara memanfaatkan “anugerah” tersebut. Begitupun juga halnya dengan mahadata.



“Bagaimanakah tahapan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP? Apakah tujuan dari setiap tahapan?”

Jawaban

Tahapan mekanisme penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan
 - a. Penetapan satuan kerja dan penyiapan Tim *Assessor*
 - b. Pembentukan Tim *Counterpart*
 - c. Penetapan rencana kegiatan antara lain: Ruang Lingkup, Periode, Pendanaan, Langkah Kerja, dan lain lain
 - d. Presentasi Awal: Diseminasi, Rencana Kegiatan, Koreksi jika ada perubahan
2. Tahapan Pelaksanaan
 - a. Pengisian kuesioner (representasi sub unsur sesuai karakteristik level maturitas secara Panel dan Individu)
 - b. Melakukan validasi dengan melihat konsistensi jawaban responden dan skor awal maturitas
 - c. Pengujian bukti maturitas dengan menyebarkan kuesioner lanjutan, melakukan wawancara, reviu dokumen, dan melakukan observasi
 - d. Pemberian skor akhir maturitas dan saran perbaikan
3. Tahapan Pelaporan

Melakukan penyusunan Laporan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Adapun tujuan dari tiap tahapan adalah sebagai berikut:

 - Tahapan Persiapan bertujuan untuk menentukan ruang lingkup kegiatan dan rencana kerja pelaksanaan penilaian maturitas SPIP pada K/L/D, termasuk rencana penetapan sampel satker yang representatif maupun rencana penyusunan Tim *Assessor* dan Tim *Counterpart*.
 - Tahapan Pelaksanaan bertujuan untuk memberikan penilaian mengenai tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L/D, yang terdiri dari penilaian pendahuluan (survei persepsi) dan pengujian bukti-bukti penyelenggaraan SPIP.
 - Tahapan Pelaporan bertujuan untuk mengomunikasikan hasil penilaian penyelenggaraan SPIP kepada manajemen K/L/D, termasuk saran perbaikan terkait langkah-langkah yang diperlukan manajemen untuk meningkatkan dan/ atau menguatkan maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L/D.

Pelaksanaan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, saat ini, didorong untuk menggunakan aplikasi SPIP Versi 2 dengan *link* www.spip.bpkp.go.id

Jawaban

Penilaian maturitas SPIP ditujukan pada entitas K/L/D, yang dapat dilaksanakan secara sensus pada keseluruhan satker K/L/D (Eselon I/II) maupun secara sampel pada beberapa satker K/L/D (Eselon I/II) yang merepresentasikan entitas K/L/D. Adapun kriteria pemilihan sampel satker K/L/D yang representatif harus memperhatikan beberapa faktor, antara lain yaitu:

1. Kompleksitas program/kegiatan beserta risiko satker K/L/D.
2. Besarnya sumber daya (anggaran dan pegawai) yang dikelolanya.
3. Pemilihan sampel juga harus memperhatikan keterwakilan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintah, seperti; fungsi perencanaan dan penganggaran, fungsi pelayanan utama dan penunjang, serta fungsi pengawasan intern.

Berikut contoh penetapan sampel pada Kementerian/Lembaga dan pada Pemerintah Daerah:

No	Fungsi Penyelenggaraan Pemerintah	Contoh Sampel di Kementerian /Lembaga	Contoh Sampel di Pemerintah Daerah
1	Perencanaan	Sekretariat Utama/ Jenderal (Es. I) c.q. Biro Perencanaan (Es. II)	Bappeda (Es. II)
2	Penganggaran	Sekretariat Utama/ Jenderal (Es. I) c.q. Biro Keuangan (Es. II)	DPKAD (Es. II)
3	Pelayanan Utama	Kedeputian/Direktorat Jenderal Teknis (Es. I)	Dinas Pendapatan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Infrastruktur (Es. II), dan lain lain
4	Pelayanan Penunjang	Sekretariat Utama/ Jenderal (Es. I) c.q. Biro Infokom/IT, Biro Kepegawaian dan Organisasi, Biro Hukum dan Humas (Es. II)	Sekretaris Daerah (Es. II) c.q. Bid Infokom/ IT, Bidang Hukum dan Humas (Es. III)
5	Pengawasan Intern	Sekretariat Utama/ Jenderal (Es. I) c.q. Inspektorat (Es. II)	Inspektorat (Es. II)



“Bagaimanakah kriteria pemilihan sampel satker K/L/D?”

Community of Practice: Jangan Biarkan Pengetahuan Hilang Ditelan Bumi

Setya Nugraha,
Kasubdit PAEP di Deputi Perekonomian dan Kemaritiman BPKP



Ilustrasi
Aska Wibianto

Alkisah di sebuah kantor akuntan pemerintah, anggotanya banyak auditor sarat kompetensi dan pengalaman. Waktu terus berlalu dan berlalu pula pengetahuan dan pengalaman auditor senior yang harus mundur karena batas usia pensiun. Beberapa auditor yang berkarya di tempat lain, dengan terpaksa juga membawa pengetahuan dan pengalamannya tanpa meninggalkan warisan *knowledge* pada kantor akuntan pemerintah tersebut. Ketidakberdayaan organisasi untuk memelihara pengetahuan yang dimiliki oleh para pegawainya sebagai aset penting bagi organisasi menjadi isu penting yang perlu dibahas.

Communities of Practice (CoP) atau dikenal sebagai Masyarakat Praktisi adalah bagian penting dari *Knowledge Management System* yang berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi melalui peningkatan kapabilitas anggota organisasi, sehingga anggota organisasi dapat dimanfaatkan secara optimal. Etienne Wenger (1998) mendefinisikan CoP sebagai individu-individu dengan ketertarikan yang sama yang berkumpul baik secara langsung maupun virtual untuk berbagi dan membahas berbagai permasalahan, mendiskusikan *best practices* dan *lesson learned*. CoP sejatinya bukanlah sebuah konsep baru. Di era ketika manusia masih hidup secara nomaden, kegiatan CoP juga sudah banyak dilakukan oleh manusia pada era tersebut antara lain membicarakan strategi menghadapi binatang buas, mencari makanan, menghadapi cuaca ekstrim dan sebagainya. Dalam perkembangannya konsep CoP berubah menjadi sebuah struktur sosial yang berbasis pengetahuan.

Mengapa CoP penting?

Bentuk dari *Communities of Practice* sangat bervariasi tergantung pada tujuan dan

kebutuhan komunitas tersebut, namun hal yang mendasar tentunya adalah kegiatan saling berbagi pengetahuan. CoP merupakan kombinasi unik yang terdiri dari tiga elemen fundamental yaitu domain atau bidang pengetahuan, *community* atau sekumpulan orang pemerhati bidang pengetahuan tersebut, dan *practice* yaitu kegiatan berbagi pengetahuan melalui praktik untuk meningkatkan kemampuan pada domain tersebut. CoP sebagai bagian dari *knowledge management system* mengandung makna sebagai sebuah upaya terciptanya lingkungan atau suasana saling berbagi pengetahuan dan pengalaman serta mengembangkan pengetahuan antar anggota organisasi karena pengetahuan telah dijadikan sebagai aset utama (Clair dan Stanley, 2010).

CoP juga sebagai sebuah sarana untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam upaya membuat organisasi lebih kuat menghadapi tantangan agar tetap *survive* dan bertumbuh, karena CoP mampu menghasilkan *intangible asset*. Perkembangan teknologi yang sedemikian pesat menuntut organisasi untuk memiliki *database* informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan, antara lain beberapa organisasi bahkan sudah menggunakan *Big Data*. CoP merupakan jawaban organisasi mengantisipasi perkembangan teknologi tersebut. Dalam fenomena di awal tulisan, pengetahuan dan kompetensi para auditor dalam organisasi tersebut akan sirna tanpa bekas karena setiap anggota organisasi pergi tanpa mewariskan pengetahuan, pengalaman dan kompetensi yang mereka miliki bagi organisasi. Dengan adanya CoP, *database* informasi berisi pengetahuan dapat terus diperkaya. Sebagai tambahan, melalui CoP,

keterikatan antar anggota organisasi juga dapat ditumbuhkan sehingga dapat menguatkan *engagement* anggota pada organisasi.

Selain itu, CoP juga sebagai sarana pergaulan organisasi dalam lingkungan yang luas untuk pengembangan tema yang diusung dalam CoP. Sebagai contoh, BPKP telah membentuk CoP dengan mengusung tema Sistem Pengendalian Intern dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang bermanfaat menjadi rujukan bagi organisasi serupa di level internasional untuk mengembangkan pengetahuan tentang tema-tema tersebut. CoP telah berkembang menjadi masyarakat praktisi bagi *government internal auditor* dalam lingkup yang lebih luas.

Peran organisasi

Nonaka dan Takeuchi (1995) menggolongkan pengetahuan menjadi dua jenis menurut sifatnya yaitu pengetahuan *tacit* merupakan pengetahuan yang masih tersimpan dalam individu dan belum disimpan dalam sebuah media dokumentasi, dan pengetahuan *explicit* yaitu pengetahuan yang sudah disimpan dalam sebuah media dokumentasi. Kesalahan yang umum terjadi adalah rata-rata organisasi tidak *aware* terhadap pengetahuan *tacit* yang dimiliki anggota organisasi. Peran organisasi harus secara nyata mengoptimalkan pengetahuan *tacit* menjadi tidak hanya pengetahuan *explicit* namun juga memberdayakan pengetahuan anggota organisasi menjadi sumber energi bagi kemajuan organisasi. Organisasi harus memastikan bahwa pengetahuan, pengalaman dan kompetensi harus terus diciptakan dan dikembangkan, disimpan, diorganisasikan serta dapat diakses dan dibagikan bagi

anggota untuk keperluan inovasi dan pengembangan organisasi.

Setidaknya, organisasi perlu mengefektifkan ketiga elemen dasar dari sebuah CoP yaitu *domain*, *community* dan *practice* (McDemort dan Snyder, 2002). Dalam konteks *domain*, organisasi harus mampu menumbuhkan *esprit de corps* yaitu kesamaan identitas yang dibangun. Sebagai contoh, organisasi dapat menginternalisasikan kepada seluruh anggota organisasi sebagai *trusted advisor*. Nilai-nilai sebagai *trusted advisor* antara lain integritas, orientasi pada *stakeholders*, serta profesionalisme harus dikukuhkan sehingga menjadi nilai-nilai yang dipegang oleh anggota organisasi. Kejelasan *domain* ini mendorong anggota organisasi untuk berkontribusi bagi implementasi nilai-nilai luhur organisasi. Untuk menjadi anggota organisasi yang profesional khususnya bergerak dalam bidang jasa, maka mengasah dan meningkatkan pengetahuan dan kompetensi melalui CoP menjadi sebuah kebutuhan.

Dalam konteks upaya membentuk *Community*, maka sudah selayaknya organisasi menciptakan jaringan sosial kegiatan pembelajaran dan berbagai fasilitas lainnya. Di era kekinian, organisasi telah mendorong unsur *Community* melalui wadah berbagai forum baik dalam bentuk digital, media sosial (antara lain *whatsapp*) maupun forum yang dapat bertatap muka secara langsung antara lain melalui *library cafe*, *focus group discussion*, seminar, program pengembangan mandiri, dan sebagainya. Organisasi juga perlu membuat *rules of the game* yang mencakup antara lain bagaimana antar anggota organisasi dapat terhubung, frekuensi ideal pertemuan, jenis kegiatan, penanganan konflik antar anggota, dan sebagainya.

Practice merupakan seperangkat kerangka ide dan pemikiran, gaya bahasa, cerita, serta dokumen mengenai kegiatan saling berbagi pengetahuan anggota organisasi. Dengan demikian, organisasi mendukung pendokumentasian *practice* tersebut dan mengkodifikasikan dan membagikan untuk anggota organisasi lainnya melalui berbagai sarana yang sudah dibentuk sebelumnya. Sebagai contoh, praktik CoP bagi para anggota organisasi yang sudah purna bakti maupun yang akan meninggalkan organisasi tersebut dapat dilakukan untuk menangkap warisan



Ilustrasi
Aska Wibianto

pengetahuan, pengalaman dan kompetensi anggota organisasi tersebut dan didokumentasikan menjadi sebuah pengetahuan yang bermanfaat bagi organisasi. Praktik kewajiban anggota organisasi yang akan meninggalkan organisasi untuk memberikan satu atau dua buku bagi perpustakaan merupakan praktik yang baik, namun jauh lebih baik adalah melakukan acara sarasehan, seminar, bincang dan diskusi bagi anggota organisasi yang sarat dengan pengetahuan dan pengalaman namun karena sesuatu hal harus meninggalkan organisasi tersebut. Sebagai contoh, melalui acara-acara tersebut, eksplorasi pengalaman beberapa auditor yang berhasil membongkar sebuah *fraud* yang bernilai miliaran rupiah, pengalaman beberapa anggota organisasi yang mampu membuat sistem pengukuran kinerja berbasis kompetensi dapat diwujudkan dan didokumentasikan untuk *lesson learned* bagi organisasi.

Penutup

Kreatifitas dan inovasi merupakan “darah” organisasi karena pengalaman empiris menunjukkan bahwa

hanya organisasi yang kreatif dan selalu berinovasi lah yang akan *survive* dan berkembang menjadi organisasi yang maju. Untuk memiliki kreatifitas dan inovasi, organisasi memerlukan *knowledge management system*. Agar *knowledge management system* berjalan efektif, maka CoP menjadi pilihan utama untuk mengolah pengetahuan menjadi aset bagi seluruh anggota organisasi dan organisasi tersebut. Dukungan organisasi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anggota organisasi untuk mengembangkan CoP maupun niat baik seluruh anggota organisasi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dan kompetensi merupakan solusi demi terciptanya *Communities of Practice* yang sehat dan efektif. Jangan biarkan pengetahuan hilang ditelan bumi.

Jadi Auditor Forensik Ciamik!

Ayu Isni Arum

Pernah dengar kasus Homex, perusahaan pengembang terbesar di Meksiko yang melakukan *fraud* dengan meninggikan penjualannya selama periode tahun 2009 sampai dengan 2011; namun pembuktiannya baru berhasil diungkap pada tahun 2017? Berdasarkan kasus ini dan berbagai kasus *fraud* lainnya, tidak berlebihan bila kita menyimpulkan bahwa pengungkapan dan pembuktian *fraud* bukanlah proses yang mudah mengingat *fraud* adalah kejahatan yang disengaja dan disembunyikan (kamuflyase).

Nah, jika pembaca tertantang untuk mengungkap kasus-kasus “*big fish*” seperti kasus Homex tersebut, Pembaca dapat mengambil kompetensi khusus di bidang audit forensik dan mengikuti ujian kompetensi *Certified Forensic Auditor* (CFrA) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSP-AF). Secara garis besar, kompetensi yang

dimiliki CFrA meliputi kemampuan mendeteksi dan mengungkap eksistensi *fraud*, menghitung kerugian keuangan akibat *fraud*, membantu proses penyelesaian litigasi terkait *fraud*, hingga membantu upaya pemulihan asetnya.

Pasti pembaca penasaran kan syaratnya apa, *iya kan? Iya kan?* Nah, untuk mengikuti ujian CFrA, calon peserta minimum berpendidikan sarjana atau diploma IV, telah mengikuti pendidikan dan pelatihan audit forensik, dan berpengalaman dalam melakukan audit keuangan, audit operasional atau penyelidikan/ penyidikan kasus korupsi minimal tiga tahun; atau berpengalaman minimal tiga tahun dalam bidang pendeteksian dan pencegahan *fraud* baik langsung maupun tidak langsung. Standar internasional yang menjadi rujukan dalam mengembangkan kompetensi auditor forensik adalah standar kompetensi dari *Certified Fraud*



Ilustrasi
Diana Pertiwi

Examiner (CFE) yang akan kita bahas di Warta Pengawasan edisi berikutnya. Literatur-literatur internasional, khususnya yang termuat dalam *Manual of Association of Certified Fraud Examiners* kemudian dimodifikasi dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan menjadi standar kompetensi audit forensik yang diformalkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Nomor Kep. 46/Men/II/2009 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Audit Forensik.

Berdasarkan SKKNI, untuk menjadi auditor forensik harus memiliki 27 kompetensi dari 4 sub bidang. Dari 27 kompetensi tersebut, SKKNI membagi dalam 94 elemen kompetensi yang dijabarkan dalam 332 Kriteria Unjuk Kerja. Sebagai prasyarat terhadap bidang kompetensi yang dimaksud, calon peserta harus memiliki pemahaman dan pengetahuan atas bidang-bidang ilmu terkait. Daftar

lengkapnya bisa pembaca peroleh di laman website resmi <http://lsp-af.or.id/>.

Tenang, pembaca jangan panik, ada caranya untuk melakukan persiapan. Bidang-bidang ilmu tersebut menjadi materi diklat audit forensik di lembaga-lembaga pelatihan audit forensik, salah satunya Lembaga Pengembangan *Fraud Auditing* (LPFA). Dilansir dari Kalender Diklat LPFA, untuk tahun 2019 ini, LPFA menyelenggarakan enam kali bimbingan persiapan ujian sertifikasi CFrA. Pelatihan tersebut berlangsung selama tiga hari (30 jam pelatihan), dengan materi mencakup perundang-undangan yang terkait *fraud* dan standar profesi audit forensik, pelaksanaan audit forensik dan perhitungan kerugian keuangan, pemberian pernyataan secara keahlian di depan penyidik dan sidang pengadilan, studi kasus, penyusunan dan pemaparan bagan arus modus operandi, simulasi sidang pengadilan, dan tutorial uji kompetensi auditor forensik. Setelah mengikuti bimbingan persiapan ujian, peserta dapat mengikuti uji kompetensi dalam rangka proses sertifikasi auditor forensik yang diselenggarakan oleh LSP-AF, selama dua hari.

Jadi, pembaca tertarik bergabung menjadi seorang auditor forensik? Gambaran sosok auditor forensik secara visual mungkin dapat disaksikan melalui akting menawan Ben Affleck dalam film *The Accountant*. Dalam film tersebut dikisahkan tokoh Christian Wolff yang diperankan Ben Affleck membongkar kasus *financial fraud* dengan menganalisa kejanggalan angka-angka laporan keuangan klien auditnya. Bagaimana, siap menjadi seperti Christian Wolff yang ciamik?



PUSDIKLATWAS

Pertanyaan:

Selamat siang Pak
 Mohon informasi apakah masih ada kelas diklat penjenjangan Auditor Madya selama triwulan terakhir tahun 2019?

Inspektorat Kabupaten Bogor

Jawaban:

Sesuai Kalender Diklat tahun 2019, masih terdapat dua kelas yang akan diselenggarakan mulai tanggal 22 Oktober 2019, bertempat di Pusdiklatwas BPKP, Ciawi, Bogor. Selain itu, apabila pendaftar yang sudah memenuhi syarat mencukupi satu kelas, kami berencana menyelenggarakan kelas tambahan mulai 19 November 2019, bertempat di luar Pusdiklatwas BPKP, Ciawi, Bogor.

Data calon peserta agar di-input dalam aplikasi Registrasi Online BPKP pada alamat: <http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/registrasi>. Data isian pada aplikasi tersebut beserta dokumen pendukungnya akan diverifikasi oleh Pusat Pembinaan JFA BPKP sebagai dasar penetapan calon peserta diklat.

Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang P3APIP, Pusdiklatwas BPKP melalui telepon nomor (0251) 8249001-05 (sentral).

Terima kasih.

**Salam,
 Kapusdiklatwas, Djoko Prihardono**

Pertanyaan:

Selamat siang Pak

1. Pada tahun 2020, kami mengajukan permohonan kerja sama diklat fungsional auditor jenjang Terampil, Ahli dan Muda. Mohon informasi terkait persyaratan diklat tersebut, yang akan diikuti oleh anggota TNI.
2. Mohon penjelasan, bagaimana jenjang diklat ahli dan muda, mana yang lebih tinggi.

Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan

Jawaban:

1. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Pusdiklatwas BPKP dalam penyelenggaraan diklat fungsional. Persyaratan mengikuti diklat untuk anggota TNI berbeda dengan PNS. Persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Kapusbin JFA Nomor 1477 Tahun 2017, dengan ringkasan sebagai berikut:

No.	Jenjang	Pendidikan/ Sertifikasi	Usia	Pangkat	Pengalaman Bidang Tugas Pengawasan
1	Terampil	Paling rendah Diploma III atau Kursus Dasar Kecabangan	Paling tinggi 53 tahun	Paling rendah Letnan Dua	-
2	Ahli	Paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma IV atau DIKLAPA atau SEKKAU	Paling tinggi 56 tahun	Paling rendah Mayor	-
3	Muda	Memiliki Sertifikat Auditor Pertama	-	Paling rendah Letnan Kolonel	Secara penuh lebih dari enam bulan dan pada saat diusulkan masih bertugas di unit pengawasan internal
4	Madya	Memiliki Sertifikat Auditor Muda	-	Paling rendah Kolonel atau Letnan Kolonel yang telah menduduki jabatan Eselon III atau Letnan Kolonel yang telah menduduki jabatan Golongan IV	Secara penuh lebih dari enam bulan dan pada saat diusulkan masih bertugas di unit pengawasan internal
5	Utama	Memiliki Sertifikat Auditor Madya	-	Pangkat paling rendah Brigadir Jenderal atau Laksamana Pertama atau Marsekal Pertama	Secara penuh lebih dari enam bulan dan pada saat diusulkan masih bertugas di unit pengawasan internal

Selain persyaratan di atas, keikutsertaan dalam program diklat, harus diusulkan oleh pimpinan di unit kerja masing-masing.

2. Jenjang diklat dalam Jabatan Fungsional Auditor adalah sebagai berikut:

- 1) Ahli Pertama
- 2) Ahli Muda
- 3) Ahli Madya
- 4) Ahli Utama

Jenjang di atas disusun berdasarkan urutan mulai paling rendah (Ahli Pertama) sampai paling tinggi (Ahli Utama). Untuk menduduki jabatan Auditor Pertama, salah satu persyaratannya adalah lulus sertifikasi dalam program diklat Pembentukan Auditor Ahli. Untuk melanjutkan diklat ke jenjang berikutnya (Auditor Muda), sebagaimana kami sampaikan pada tabel butir 1 di atas, salah satu persyaratannya adalah memiliki sertifikat lulus Auditor Pertama, sehingga jenjang Muda lebih tinggi dari jenjang Ahli/Pertama.

**Salam,
 Kapusdiklatwas, Djoko Prihardono**

TEKA TEKI SOBwas

**AYOO...
Temukan jawabannya di
WP EDISI 2 TAHUN 2019
menangkan hadiahnya**

Mendatar

- Kemampuan berpikir terganggu (Istilah)
- Kita datang, Kita Riang, Kita.....
- Pemangku Kepentingan
- Sekretariat Utama (singkat)
- Corporate University* (singkat;Eng)
- A pada ANEKA
- Kesadaran (Eng)
- Kegiatan menyambut HUT BPKP ke 36
- Sistem pembelajaran yang dikembangkan pusdiklatwas BPKP
- Studi Banding (Eng)
- Wajar tanpa pengecualian (Singkat)
- Kegiatan temu muka yang dilakukan media (Eng)
- Salah satu yang dijaga organisasi

Menurun

- Tim Penilai (Eng)
- Sistem Manajemen Daerah (Singkat)
- Nama Nilai Dasar ASN
- Indonesia Port Corporation (Singkat)
- Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
- Kemampuan Pegawai
- Cara (Sinonim)
- Salah Satu Negara yang Menjalin Hubungan dengan BPKP
- Central Coordinating Agency (Singkat)
- Budaya (sinonim)

Kirimkan jawaban Anda ke email redaksi Warta Pengawasan: wartapengawasan@gmail.com dan sertakan biodata Anda



PUSBIN JFA

Pertanyaan:

Selamat siang, dimana kami bisa mengakses LAMPIRAN dari Peraturan-BPKP-Nomor-09-Tahun-2019 tentang pengangkatan PNS dalam JFA melalui inpassing/penyesuaian dan juknis penetapan angka kredit penyesuaian/inpassing 2019?

Terima kasih.

Salam Hangat
Novario, Salakan

Jawaban:

Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2019 dapat diunduh melalui website BPKP, atau dapat menghubungi kami melalui email pusbinajfa@bcpk.go.id

Dokumen yang diminta juga sudah kami kirimkan ke email: nori.itda@gmail.com

Salam,
Kapusbin JFA, Edi Mulia

Pertanyaan:

Berdasarkan Perka Pusbin JFA No 60 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Inpassing, akan diadakan inpassing auditor, dengan materi yang akan ditanyakan tentang telaah seawat, kode etik dan standar audit, disampaikan juga *link* materi bisa diakses di pusbinajfa.bcpk.go.id, namun saya tidak menemukan materi tersebut. Mohon bantuannya di mana saya bisa *download*. Terima kasih.

Ivandi, Sekayu

Jawaban:

Materi Uji Kompetensi Inpassing dapat diunduh melalui website Pusat Pembinaan JFA atau di website Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), atau dapat menghubungi kami melalui email pusbinajfa@bcpk.go.id. Materi dimaksud juga sudah kami kirimkan ke email: baikjuni2@gmail.com

Salam,
Kapusbin JFA, Edi Mulia

Pembaca, rubrik ini kami sediakan untuk Anda yang mempunyai masalah dengan jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik seputar aturan-aturan JFA, angka kredit maupun sertifikasinya. Pengasuh rubrik ini adalah Pak Edi Mulia dan Pak Djoko Prihandono. Surat yang Anda layangkan untuk rubrik ini, hendaknya ditujukan ke warta_pengawasan@bcpk.go.id atau redaksi Warta Pengawasan.

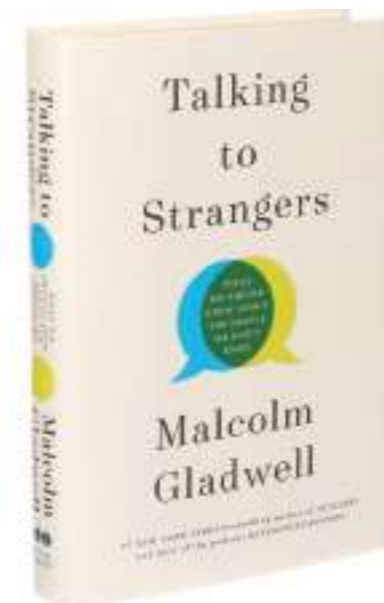
SKEPTIS PANGKAL SELAMAT

Nadia Khaerunnisa

Judul:
Talking to Strangers: What We Should Know About The People We Don't Know
Pengarang:
Malcolm Gladwell
Penerbit:
Little, Brown And Company
Tahun terbit:
2019
Dimensi:
400 halaman

“Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda”. Generasi tahun 90-an mungkin tidak asing dengan *tagline brand bodyspray* pria tersebut. Sebegitu pentingnya kesan pertama, seringkali orang, bahkan mungkin dengan bersusah payah, menjaga “*image*”-nya saat berinteraksi dengan orang lain, khususnya orang yang baru pertama kali ditemui. Jika keperluan kita hanya sekadar berkenalan, mungkin tidak ada masalah. Tapi, bagaimana jika kita perlu berhadapan dengan orang asing dan menilai kejujurannya guna mendapatkan informasi? Tentu ini penting, terlebih bagi para auditor yang kerap melakukan wawancara sebagai bukti pendukung pengumpulan informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. *Nah*, dalam buku keenamnya ini, Gladwell berusaha menjelaskan mengapa kita seringkali luput dalam membaca situasi atau tertipu kesan yang ditunjukkan oleh orang lain.

Sebuah teori yang digagas oleh Psikolog Tim Levine, *Truth Default Theory* (TDT), menyebutkan bahwa asumsi dasar kita adalah setiap orang selalu mengatakan yang sebenarnya. Menurut penelitian yang dilakukannya, hal ini manusiawi jika tidak ditemukan adanya keraguan atau *red flags*, secara otomatis kita mempercayai ucapan maupun tindakan orang lain. Kita memilih percaya karena kita tidak memiliki cukup bukti untuk tidak percaya. Melalui berbagai studi kasus, Dalam buku tersebut, Gladwell mengupas secara gamblang TDT ke dalam lima bagian.



Dibuka dengan studi kasus berjudul “*Fidel Castro’s Revenge*”, Gladwell menulis tentang bagaimana Fidel Castro mengelabui intelijen Amerika melalui para *double agents* mereka, salah satunya “*The Queen of Cuba*” Ana Montes. Bertahun-tahun, Ana berhasil menutupi jati dirinya sebagai kepanjangan tangan Fidel Castro dan memata-matai badan intelijen negara adikuasa tersebut. Sebelum pada akhirnya terbongkar, Ana yang cemerlang berkarir sebagai intelijen pada US *Defense Intelligence Agency* ini berhasil bergerilya tanpa memancing kecurigaan rekan kerjanya. Tentu kita tak habis pikir, bagaimana mungkin badan yang semestinya peka dalam mengidentifikasi siasat, masih bisa alpa dalam menangkap sinyal-sinyal penipuan? Gladwell menunjukkan kondisi tersebut sebagai sebuah legitimasi atas *Truth Default Theory*.

Studi kasus lain yang menarik untuk dinikmati dalam buku ini adalah skandal penipuan investasi Madoff. Sebuah upaya pengusutan

skema Ponzi terbesar di dunia yang menyeret miliarder Bernard Madoff. Gladwell memberi judul “*The Holy Fool*” untuk studi kasus ini dengan menekankan peran Harry Markopolos, seorang *independent fraud investigator* yang berhasil membongkar kejahatan keuangan tersebut. Markopolos yang disebut sebagai *Holy Fool* oleh Gladwell dinilai sebagai sebuah anomali dari *Truth Default Theory*. Bagi Markopolos, kepercayaan dan reputasi Madoff tidaklah mutlak. Ia mampu melepaskan diri dari bias yang membutuhkan para investor sehingga mampu mencium kecurangan yang dijalankan oleh Madoff. Di dunia modern, kualitas *Holy Fool* ini biasa kita kenal dengan istilah *whistleblower*.

“The Holy Fools is someone who doesn’t think this way. The statistic say that the liar and the con man are rare. But to the Holy Fool, they are everywhere.”

Pesan yang dapat diambil dari buku setebal 400 halaman ini adalah perlunya kita untuk mempraktikkan *professional skepticism* dengan terus menantang fakta-fakta yang ada dan tidak terpaku pada kondisi/sistem yang terlihat sempurna. Sikap kritis dan kepekaan terhadap isu serta lingkungan akan menuntun kita pada informasi-informasi strategis yang mendukung pengambilan keputusan.

Sebuah studi sosial yang sebaiknya dinikmati secara perlahan. Terlepas dari prokontra para anti-Gladwell, premis dan pengemasan kajian yang populer khas Gladwell ini tetap layak untuk diapresiasi. Jadi tunggu apa lagi, jika pembaca berminat, silahkan dapatkan bukunya. *Selamat membaca.*



KABAR BAIKNYA ADALAH SELALU ADA KABAR BURUK

Gilang Rahmat Hastanto

Bad news is good news dan *rating* adalah segalanya. Tentang berlakunya adagium ini di media massa kita semua sudah paham dan khatam. Bahkan, adagium ini juga berlaku di media sosial saat semua orang berlomba-lomba mendapatkan sorotan (baca: panjat sosial) di dunia maya. Tidak percaya? Ketikkan kata kunci “wisata bencana” atau “swafoto kuburan” di mesin pencari anda dan lihat hasilnya. Kembali menyoal *rating* di media,

fenomena *bad news is good news* inilah yang coba disorot oleh film ini. Tokoh utama dalam film tersebut adalah Howard Beale (Peter Finch), seorang pembawa berita tua yang *rating* acaranya terus menurun dan dipecat dalam dua minggu. Howard, yang merasa siaran beritanya hanyalah satu-satunya yang dia punya, tidak bisa berlapang dada menerima pemecatan ini. Dalam keputusasaannya, saat siaran langsung, Ia mengumumkan bahwa

Ia akan bunuh diri di siaran langsung terakhirnya. Tentu saja, apa yang dilakukannya menimbulkan kehebohan dan sensasi di dunia pertelevisian.

Kehebohan inilah yang malah justru menaikkan *rating* acara beritanya. *Union Broadcasting System* (UBS), tempatnya bekerja, merasa dia lebih berguna di tengah kekacauan yang ditimbulkannya. *Rating* dan popularitasnya yang naik membuat UBS memutuskan memberi Howard slot siaran khusus yang isinya melulu ceramah penuh amarah dan serapah. Popularitasnya terus meroket, hingga masyarakat menobatkannya sebagai “*The Mad Prophet of The Airwaves*”. Menariknya, sebagaimana pemirsa televisinya, penonton yang menyimak monolog ceramahnya kemungkinan juga akan menikmati konten yang disampaikan Howard. Mungkin karena ceramahnya lebih mirip deklamasi kabar buruk yang disampaikan secara dramatis ketimbang hanya kuliah moral bombastis. Selesai kah ceritanya? atau ada kejutan lainnya? *Nah*, pembaca perlu menyaksikannya sendiri.

Menakjubkannya, pesan satir yang disampaikan dalam film ini masih saja relevan setelah lebih empat puluh tahun berlalu. Tidak sulit membayangkan apabila film ini memiliki *setting* di masa sekarang, Howard Beale akan menjadi seorang *influencer* di internet, sehingga julukannya akan menjadi lebih canggih, “*The Insane Influencer of The Internet*”. Lucunya, penggambaran dunia pertelevisian yang penuh dengan intrik dan *gimmick* di film ini akan mengingatkan pembaca pada tayangan-tayangan berkedok realitas di dunia pertelevisian kita dewasa ini. Menarik juga menyaksikan bagaimana kabar buruk yang dibawakan Howard Beale



(dan juga nasib buruknya) berhasil menyita perhatian masyarakat. Hal ini terasa familiar, melihat fenomena bagaimana kabar-kabar buruk (bahkan juga hoaks) bisa menyebar sangat cepat di masyarakat. Tidak perlu heran, penelitian yang dilakukan oleh Marc Trussler dan Stuart Soroka di McGill University pada tahun 2014 membuktikan bahwa secara psikologis manusia memang lebih tertarik pada kabar buruk daripada kabar baik. Selamat menonton, pembaca!

Tanggal Rilis 27 November 1976
 Negara Asal Amerika Serikat
 Sutradara Sidney Lumet
 Produser Howard Gottfried, Fred C. Caruso
 Penulis Naskah Paddy Chayefsky
 Pemain Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch, Robert Duvall
 Narator Lee Richardson
 Musik Elliot Lawrence
 Sinematografi Owen Roizman
 Editor Alan Heim
 Durasi 121 Menit



KONSER MUSIK, ALTERNATIF LIBURAN AKHIR PEKAN

*"Menikmati pagi, sore, dan malam
Secangkir kopi panas, santai tanpa batas
Lalu ada Sir Dandy bernyanyi
Mocca kembali lagi
Musik indie di tivi."*

Endah N Rhesa – Liburan Indie

Bagi Pembaca yang merindukan liburan namun setiap harinya dipenuhi oleh padatnya kesibukan pekerjaan, mungkin lirik lagu berjudul Liburan Indie yang dinyanyikan oleh pasangan Endah dan Rhesa di atas bisa dijadikan sebuah referensi. Liburan tidak melulu soal gunung dan laut atau belanja dan berburu kuliner. Mendengarkan musik baik secara langsung maupun melalui perangkat digital bisa jadi salah satu solusi liburan akhir pekan. Hasil riset dari *Addiction Research Center Stanford* menyebutkan bahwa mendengarkan musik dapat menaikkan tingkat endorfin yang dapat melawan stres dan rasa sakit. Lebih dari itu, rasa gembira dan kekayaan emosional dalam musik memungkinkan tubuh menciptakan zat anestetiknya sendiri sekaligus meningkatkan kekebalan tubuh.

Nah, penulis kemarin berkesempatan mendatangi salah satu festival musik nasional tahunan yang diselenggarakan di Bali yaitu *Soundrenaline 2019*. Mengambil lokasi di Garuda Wisnu Kencana, festival ini mengangkat tema *The Spirit of All Time*. Demi menciptakan jadwal yang bersahabat bagi pemirsanya, penyelenggaraan *Soundrenaline* yang ke-17 dilaksanakan pada akhir pekan yaitu pada tanggal 7 dan 8 September 2019 dengan menghadirkan berbagai musisi dengan berbagai macam *genre* musik baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Nama-nama terkenal seperti Suede, Glenn Fredly, Kunto Aji, hingga Tulus turut memeriahkan penyelenggaraan acara ini.

Banyaknya daftar nama pemusik di acara tersebut membuat penyelenggara membuat empat panggung yaitu *A-Stage, Celebration Stage, All Time*



Foto
Adithia

Stage, dan *Creators Stage*. Yang menjadi catatan, jarak antar panggung cukup jauh sehingga memerlukan sedikit waktu tambahan apabila berpindah dari satu panggung ke panggung lainnya. Setiap musisi yang akan tampil telah diberikan jadwal yang berisi tempat dan waktu tampilnya sehingga penonton bebas memilih di panggung mana dan siapa yang ingin mereka tonton. Bagi penonton yang perutnya mudah bergejolak, panitia acara ini juga membuka gerai makanan dan minuman di dalam area GWK sehingga tidak perlu khawatir dan repot untuk keluar dari area konser.

Beberapa tips apabila menghadiri festival musik

a. Rencanakan Daftar Tonton

Festival musik yang mendatangkan puluhan musisi biasanya memiliki lebih dari satu panggung. Sebelum



pembaca datang menghadiri festival musik tersebut ada baiknya memerhatikan daftar tampil musisi yang ingin disaksikan, baik itu tempat maupun waktunya. Tidak menutup kemungkinan beberapa musisi yang pembaca ingin tonton tampil di waktu yang bersamaan.

b. Baca Aturan dan Informasi

Tidak semua acara festival musik memperbolehkan penontonnya untuk membawa kamera profesional. Jangan sampai karena tidak membaca aturan dalam acara, kamera pembaca disita oleh panitia. Untuk tetap dapat mendokumentasikan acara, pembaca bisa menggunakan kamera ponsel ataupun kamera *pocket*. Salah satu hal yang penting juga ketika datang ke dalam sebuah festival musik adalah pelajari peta atau denah area penyelenggaraan terutama letak toilet, panggung, dan tempat makan.

c. Tenaga Cadangan

Eksistensi dunia maya adalah salah satu faktor kunci pendongkrak strata sosial dalam lingkungan pergaulan. Oleh karena itu, siapkan daya tambahan untuk ponsel pembaca agar tidak habis daya pada saat melakukan pembaruan pada *Instastory*.

d. Kenyamanan Adalah Kunci

Bedakan cara berpakaian untuk pergi kondangan dan pergi ke

festival musik. Gunakanlah pakaian yang nyaman dan tidak menyusahkan diri sendiri apabila datang ke festival musik. Jangan sampai, pembaca tidak dapat menikmati penampilan musik karena terlalu sibuk dengan sepatu yang memiliki hak tinggi.

e. Uang Tunai

Walaupun kebanyakan gerai makanan dan minuman dalam sebuah acara telah menggunakan mesin EDC/Transaksi non tunai dalam kegiatan jual belinya, tidak menutup kemungkinan terdapat kebutuhan lain yang tetap memerlukan uang tunai untuk kebutuhan tidak terduga seperti parkir kendaraan ataupun ketika mesin edc tidak berfungsi/*offline*.

Jadi, sudah siap untuk liburan indie? Untuk mengetahui informasi konser musik yang akan dilaksanakan bisa memantau akun-akun sosial media yang sering dijadikan sebagai *media partner* untuk acara musik atau dengan mengikuti akun sosial media musisi atau artis yang ingin pembaca nikmati penampilan langsungnya. Akhir kata, mari berburu tiket konser sebelum habis diborong calo dan kita jadi diam *melongo*.

Adithia Ramadhan

KALENDER LIBURAN 2020

Bulan	Tanggal	Hari	Nama Liburan
Januari	1	Dabu	Tahun Baru Masehi
Januari	25	Sabtu	Tahun Baru Imlek
Marct	22	Minggu	Hara M'raj
Marct	25	Rabu	Hari Sudi Nyepi
April	10	Jum'at	Jumat Agung
Mei	1	Jum'at	Hari Buruh
Mei	7	Kamis	Hari Waisak
Mei	21	Kamis	Kenalkan Isa Almasih
Mei	24-25	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
Juni	1	Senin	Hari Lahir Pancasila
Juli	31	Jum'at	Idul Adha
Agustus	17	Senin	Hari Kemerdekaan
Agustus	20	Kamis	Tahun Baru Islam
Oktober	29	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
Desember	25	Jum'at	Hari Natal

1 minggu 7 hari ! kerja dulu. liburan dulu kali.

Bener juga si jus jeruk !

CUTI BERSAMA TAHUN 2020

- Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri | Tanggal 22, 26 dan 27 Mei (Hari Jumat, Selasa dan Rabu)
- Cuti Bersama Hari Raya Natal | Tanggal 24 Desember (Hari Kamis)

SUMPAH PEMUDA

Kami poetra dan poetri
Indonesia, mengakoe
bertoempah darah jang
satoe, tanah air Indonesia

Kami poetra dan poetri
Indonesia, mengakoe
berbangsa jang satoe,
bangsa Indonesia.

Kami poetra dan poetri
Indonesia,
mendjoendjoeng bahasa
persatoean, bahasa
Indonesia.

